LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan (akuntabilitas) kinerja, berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam LKjIP ini tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras dari semua pihak terkait yakni aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini.

Purwokerto, Maret 2022

BUPATI BANYUMAS,

Ir. ACHMAD HUSEIN

PERNYATAAN REVIU

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Faks. (0281) 643789 Email : inspektorat@banyumaskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwokerto, 31 Maret 2022

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Drs. NUGROHO PURWOADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196307291988101001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indkator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah pusat. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan stategis yang diambil Pemerintah Kabupaten banyums dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2021 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (102,65%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banyumas 2021. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan :

a. 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (90,91%) tercapai dengan dikategorikan "Sangat Tinggi";
b. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (9,09%) tercapai dengan kategori "Sedang";
c. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama belum tersedia data dikarenakan belum rilis dari Kementerian PAN dan RB.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, 5 (lima) indikator kinerja utama belum berhasil mencapai target, yaitu (1) Persentase Kemiskinan, (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) PDRB per kapita, (4) Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah, dan (5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), hal ini merupakan dampak langsung dari Pandemi Covid-19. Namun demikian untuk pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Banyumas masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 5 (lima) efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100% persentase rata-rata capaian kinerja indikator kinerja. Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2021, telah dalam proses tindaklanjut, dan telah direncanakan tindak lanjut perbaikan pada tahun 2022.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “BB”, nilai 74,96. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai tahun 2014-2020 adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	13,47	16,23	17,48	20,56	22,78	23,89	23,89
b.	Pengukuran Kinerja	6,48	9,61	10,63	12,72	18,66	19,38	19,99
c.	Pelaporan Kinerja	6,92	7,98	8,35	8,89	10,44	10,73	10,73
d.	Evaluasi Internal	4,23	4,00	5,25	6,14	6,40	7,13	7,14
e.	Capaian Kinerja	11.16	10,24	11,94	11,91	12,66	12,71	13,21
Nilai Hasil Evaluasi		**42,26**	**48,06**	**53,65**	**60,22**	**70,95**	**73,84**	**74,96**
Kenaikan			**5,80**	**5,59**	**6,57**	**10,73**	**2,89**	**1,12**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**	**C**	**CC**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan ***Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri***.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Pernyataan Reviu		ii
Ikhtisar Ekskutif		iii
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vii
Daftar Grafik		viii
Daftar Gambar		x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Potensi Kabupaten Banyumas	2
	C. Luas Wilayah	2
	D. Topografi	3
	E. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3
	F. Perangkat Daerah	5
	G. Sumber Daya Aparatur	7
	H. Sumber Daya Keuangan	9
	I. Kondisi Perekonomian	9
	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi	9
	2. Inflasi	12
	3. Tenaga Kerja	13
	J. Sosial Budaya	13
	1. Penduduk	13
	2. Kesehatan	13
	K. Isu-isu Strategis	14
	1. Kualitas Sumber Daya Manusia	14
	2. Ketersediaan Infrastruktur	15
	3. Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat	15
	4. Kemiskinan dan Pengangguran	16
	5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan	16
	6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	17
	7. Tata Kelola Pemerintahan	18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	19
	A. Rencana Strategis	19
	1. Visi	19
	2. Misi	21
	3. Tujuan dan Sasaran	21
	B. Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2021	28
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
	D. Rencana Anggaran Tahun 2021	36
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	37
	A. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021	40
	1. Tujuan 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	40
	2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	45
	3. Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan	50

4. Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian 54
5. Tujuan 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis 62
6. Tujuan 6 : Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja 65
7. Tujuan 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat 75
8. Tujuan 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 82
9. Tujuan 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehiduan Masyarakat 88
B. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran 92
BAB IV PENUTUP 104
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja 104
B. Progres penyelesaian isu-isu strategis 106
1. Kualitas Sumber Daya Manusia 106
2. Ketersediaan Infrastruktur 107
3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 108
4. Kemiskinan dan Pengangguran 109
5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan 109
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 110
7. Tata Kelola Pemerintahan 111
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	PNS berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.2.	PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Tabel 1.3.	PNS berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.4.	Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021	9
Tabel 1.5.	Banyaknya Penduduk Usia Kerja menurut Karakteristik Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2016-2020	13
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021	24
Tabel 2.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023	29
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	34
Tabel 2.4.	Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	36
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	38
Tabel 3.3.	Predikat Kinerja Tahun 2021	39
Tabel 3.4.	Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020	41
Tabel 3.5.	Program dan Anggaran Tujuan 1 Tahun 2021	42
Tabel 3.6.	Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021	48
Tabel 3.7.	Program dan Anggaran Tujuan 2 Tahun 2021	49
Tabel 3.8.	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dari Tahun 2018-2021	51
Tabel 3.9.	Program dan Anggaran Tujuan 3 Tahun 2021	52
Tabel 3.10.	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021	56
Tabel 3.11.	Program dan Anggaran Tujuan 4 Tahun 2021	59
Tabel 3.12.	Program dan Anggaran Tujuan 5 Tahun 2021	64
Tabel 3.13.	Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Tahun 2021	67
Tabel 3.14.	Program dan Anggaran Tujuan 6 Tahun 2021	72
Tabel 3.15.	Kondisi jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2021	76
Tabel 3.16.	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap dari Tahun 2017-2021	77
Tabel 3.17.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2017-2021	78
Tabel 3.18.	Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021	79
Tabel 3.19.	Program dan Anggaran Tujuan 7 Tahun 2021	81
Tabel 3.20.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021	85
Tabel 3.21.	Program dan Anggaran Tujuan 8 Tahun 2021	87
Tabel 3.22.	Program dan Anggaran Tujuan 9 Tahun 2021	90
Tabel 3.23.	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021	92
Tabel 3.24.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2021	93
Tabel 3.25.	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	94
Tabel 3.26.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	96
Tabel 4.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021 (%)	10
Grafik 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (Dalam Milyar Rupiah)	10
Grafik 1.3.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021 (Dalam Milyar Rupiah)	11
Grafik 1.4.	PDRB per Kapita Kabupaten banyumas Tahun 2018-2021 (juta rupiah)	12
Grafik 1.5.	Inflasi Kabupaten Banyumas (%) Tahun 2018-2021	12
Grafik 1.6.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas Tengah Tahun 2018-2021	14
Grafik 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021	40
Grafik 3.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	46
Grafik 3.3.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2021	47
Grafik 3.4.	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	51
Grafik 3.5.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	52
Grafik 3.6.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	55
Grafik 3.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	56
Grafik 3.8.	PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	58
Grafik 3.9.	PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (juta rupiah)	59
Grafik 3.10.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	62
Grafik 3.11.	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Kabupaten Sekitar	63
Grafik 3.12.	Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	66
Grafik 3.13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	69
Grafik 3.14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	71
Grafik 3.15.	Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	75
Grafik 3.16.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021	83
Grafik 3.17.	Angka Kriminal Kabupaten Banyumas tahun 2018-2021 (per 10.000 Penduduk)	88
Grafik 4.1.	Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan ke-2	106
Grafik 4.2.	Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tujuan ke-3	107

Grafik 4.3.	Persentase Kinerja Infrastuktur	108
Grafik 4.4.	Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat	108
Grafik 4.5.	Kemiskinan dan Pengangguran	109
Grafik 4.6.	Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan	110
Grafik 4.7.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Kabupaten Banyumas	2
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas	6
Gambar 3.1.	Penerimaan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2020	45
Gambar 3.2.	Peresmian Pembangunan Fasilitas Kesehatan oleh Bupati	50
Gambar 3.3.	Bupati Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaan Tatap Muka	50
Gambar 3.4.	Bupati Memberikan Pemberian Bantuan Pembiayaan Kesehatan	53
Gambar 3.5.	Penanganan Korban Bencana Alam	54
Gambar 3.6.	Pembangunan Destinasi Wisata Baru di Banyumas	61
Gambar 3.7.	Kunjungan Menteri Perindustrian ke KSU Nira Satria Pernasidi Cilongok	61
Gambar 3.8.	Bupati Banyumas Meresmikan Galeri Niaga Banyumas	64
Gambar 3.9.	Kunjungan Bupati Banyumas ke Kebun Melon Hidroponik di Kecamatan Purwojati	65
Gambar 3.10.	Bupati Banyumas Membuka Job Fair 2021 Secara Virtual	74
Gambar 3.11.	Peresmian 6 (enam) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Baru	74
Gambar 3.12.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan	77
Gambar 3.13.	Bupati Banyumas Meresmikan Program Pembangunan RTLH di Desa Papringan Kecamatan Banyumas	79
Gambar 3.14.	Wakil Bupati Banyumas melakukan Ujicoba Angkutan Sungai Serayu	81
Gambar 3.15.	Peresmian Bus Trans Banyumas oleh Bupati Banyumas dan Dirjen Perhubungan Darat	81
Gambar 3.16.	Kunjungan Menparekraf Ke Desa Cikakak	84
Gambar 3.17.	Bupati Banyumas Melakukan Uji Coba Bus Wisata	88
Gambar 3.18.	Forum Umat Beragama	92
Gambar 3.19.	Peluncuran Layanan Si Doi Mas (Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna)	102
Gambar 3.20.	Hotel Rosenda sebagai Rumah Sakit Darurat dan Rumah Karantina Penderita Covid-19	102

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan SAKIP berdasarkan pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

Penyusunan pelaporan kinerja akan disajikan dalam buku ini dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. POTENSI KABUPATEN BANYUMAS

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 108 meter diatas permukaan laut, terletak antara 7 º 15’ 05” - 7 º 37’ 10” Lintang Selatan dan antara 108 º 39’ 17” - 109 º 27’ 15” Bujur Timur.

Gambar 1.1.
Peta Kabupaten Banyumas

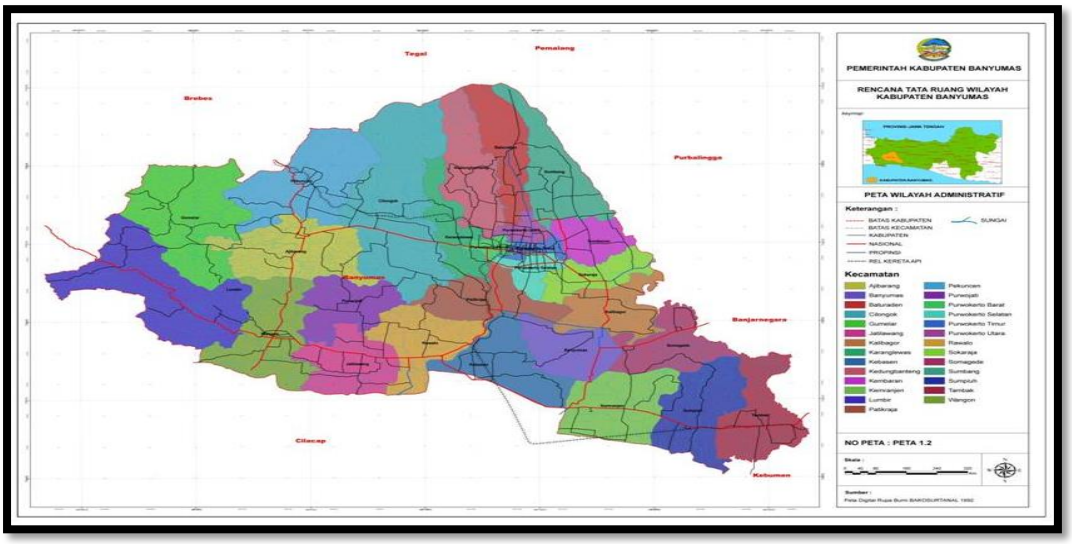

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Banyumas berbatasan dengan wilayah kabupaten yang lain yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

C. LUAS WILAYAH

Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas , wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 Ha, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 Ha.

Dari luas wilayah Kabupaten Banyumas tersebut terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Luas penggunaan lahan pertanian adalah 100.712 Ha dan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebesar 32.047 Ha.

D. TOPOGRAFI

Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 mdpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 mdpl yaitu seluas 40.385,3 Ha. Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

E. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Urusan pemerintahan konkruen dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
   a) Pendidikan;
   b) Kesehatan;
   c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
   f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
   a) Tenaga Kerja;
   b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c) Pangan;
   d) Pertanahan;
   e) Lingkungan Hidup;
   f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i) Perhubungan;
j) Komunikasi dan Informatika;
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l) Penanaman Modal;
m) Kepemudaan dan Olahraga;
n) Statistik;
o) Persandian;
p) Kebudayaan;
q) Perpustakaan;
r) Kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi :
   a) Kelautan dan Perikanan;
   b) Pariwisata;
   c) Pertanian;
   d) Kehutanan;
   e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
   f) Perdagangan;
   g) Perindustrian;
   h) Transmigrasi.

F. PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menajdi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021 berjumlah 56 Perangkat Daerah, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas disajikan sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas

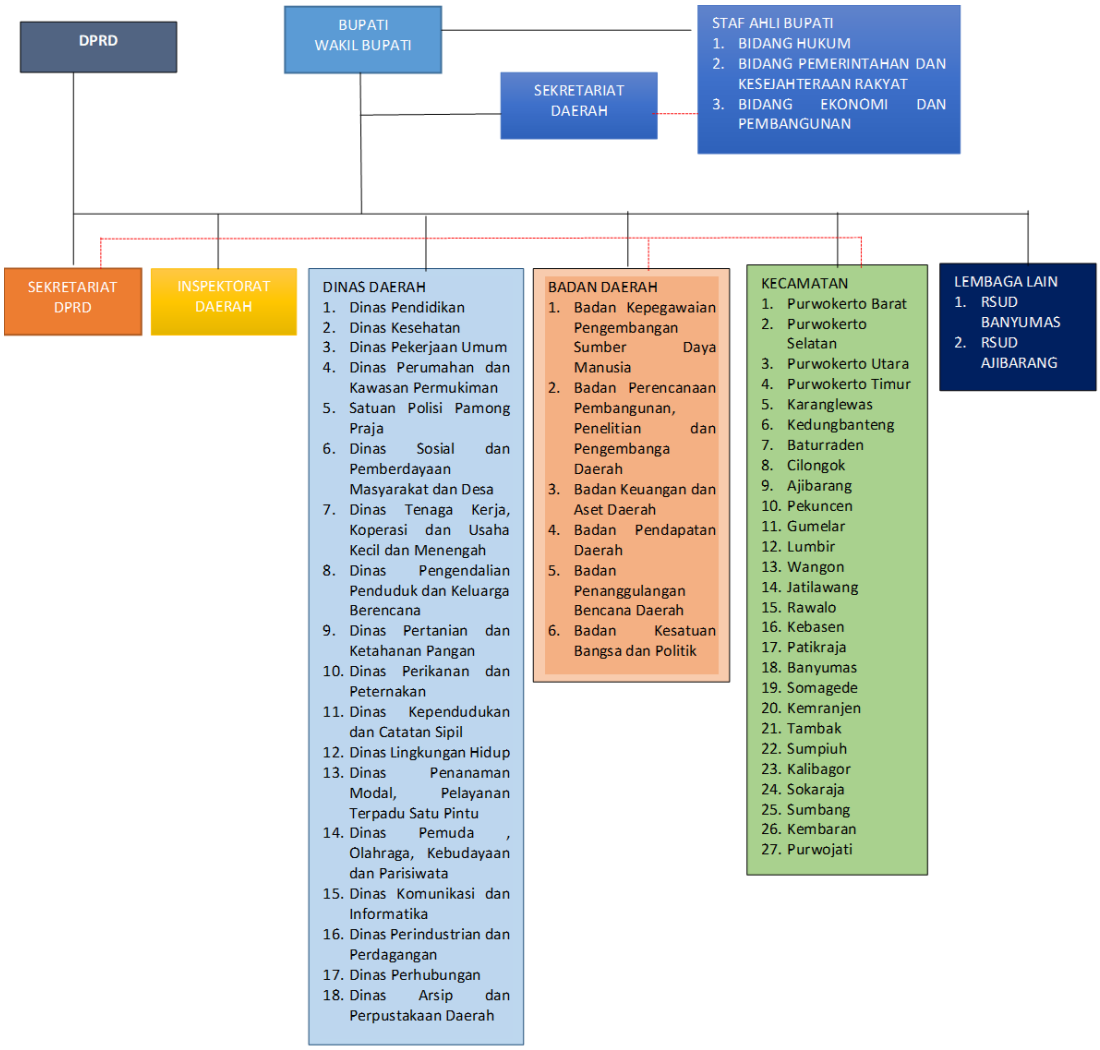

Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. UPTD pada Dinas Kesehatan :
   a) Puskesmas sebanyak 40;
   b) Balai sebanyak 2;
   c) Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto.
2. UPTD pada Dinas Pendidikan :
   a) SMP Negeri sebanyak 71;
   b) SD Negeri sebanyak 768;

c) TK Negeri sebanyak 6;
d) Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 3.

3. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup :
   a) Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah sebanyak 6;
   b) Laboratorium Lingkungan Hidup;
   c) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
4. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : Balai Latihan Kerja.
5. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan :
   a) Pusat Kesehatan Hewan;
   b) Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
   c) Pengembangan Budidaya Air Tawar ;
   d) Rumah Potong Hewan.
6. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan : Balai Benih Pertanian.
7. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja : Unit Pemadam Kebakaran.
8. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Pasar Wilayah sebanyak 4
9. UPTD pada Dinas Pemuda, Olaharag, kebudayaan dan Pariwisata :
   a) Lokawisata Baturraden;
   b) Lokawisata Purwomas;
   c) Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria).
10. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
11. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum :
    a) Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah sebanyak 7;
    b) Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
12. UPTD pada Dinas Perhubungan :
    a) Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan;
    b) Pengujian Kendaraan Bermotor.

G. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai

dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1.
PNS berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	248	25	273	2,33
Golongan II	1.109	831	1.940	16,57
Golongan III	2.184	4.061	6.245	53,35
Golongan IV	1.506	1.733	3.247	27,74
Jumlah	**5.047**	**6.658**	**11.705**	**100,00**

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2021

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	169	5	175	1,49
SMP	294	25	319	2,73
SMA	989	411	1.385	11,96
D-I/D-II	66	47	113	0,97
D-III	311	1.091	1.402	11,98
Profesi	20	39	59	0,50
S-1	2.872	4.871	7.743	66,15
S-2	323	168	491	4,19
S-3	3	1	4	0,03
Jumlah	**5.047**	**6.658**	**11.705**	**100,00**

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2021

3. Berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS di Kabupaten Banyumas berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.
PNS berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Pimpinan Tinggi	27	4	31	0,27
Administrator	148	51	199	1,70
Pengawas	277	230	507	4,33
Fungsional Tertentu	2.731	4.909	7.640	65,27
Pelaksana	1.864	1.464	3.328	28,43
Jumlah	**5.047**	**6.658**	**11.705**	**100,00**

Sumber : BKPSDM Kab. Banyumas, 2021

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka komposisi pengawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bervariasi, yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan bekerja yang sama.

H. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2021 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	**Pendapatan Daerah**	**3.430.205.731.730**	**3.425.189.190.159**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	710.179.509.944	710.179.509.944
1.2	Pendapatan Transfer	2.532.807.430.337	2.532.807.430.337
1.3	Lain-lain PAD yang sah	187.218.791.449	182.202.249.878
2.	**Belanja Daerah**	**3.869.010.672.089**	**3.863.994.130.518**
2.1	Belanja Operasi	2.560.951.653.953	2.547.958.558.032
2.2	Belanja Modal	594.558.116.088	602.534.670.438
2.3	Belanja Tidak Terduga	84.978.997.098	84.978.997.098
2.4	Belanja Transfer	628.521.904.950	628.521.904.950
3.	**Pembiayaan Daerah**	**438.804.940.359**	**438.804.940.359**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	489.150.940.359	489.150.940.359
3.1.1	Pengeluaran Pembiayaan	50.346.000.000	50.346.000.000
3.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0

Sumber : BKAD Kab. Banyumas, 2021

I. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kepala atau per satu orang penduduk selama satu tahun

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diikuti oleh meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas. Berikut ini disajikan grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2017-2021.

Grafik 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2021 (%)

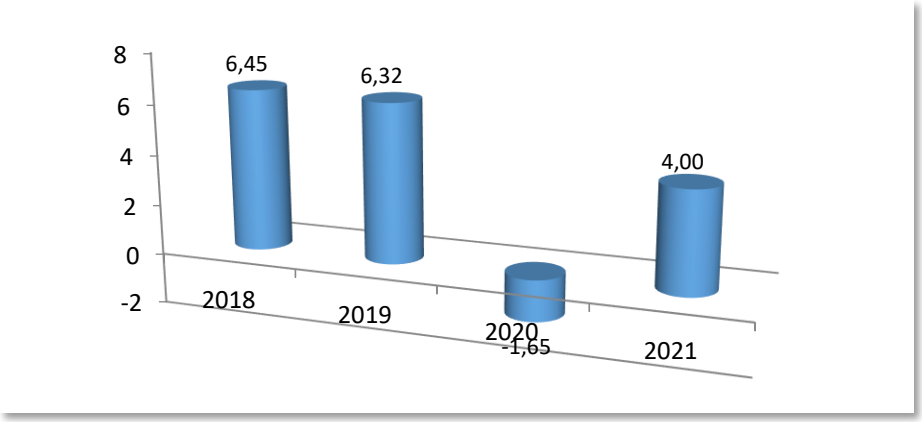

Sumber : BPS, 2017-2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku Tahun 2017-2021 disajikan dalam gambar berikut :

Grafik 1.2.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2021 (Dalam Milyar Rupiah)

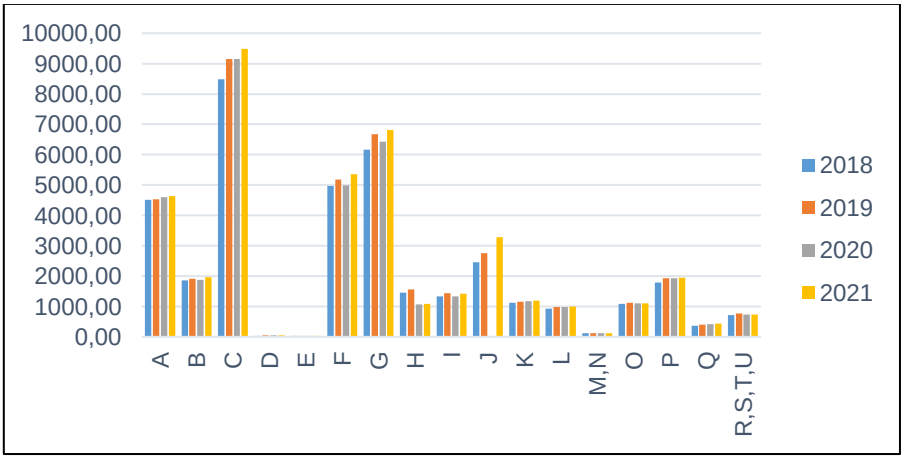

Sumber : BPS,2017-2022

Grafik. 1.3.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2021 (Dalam Milyar Rupiah)

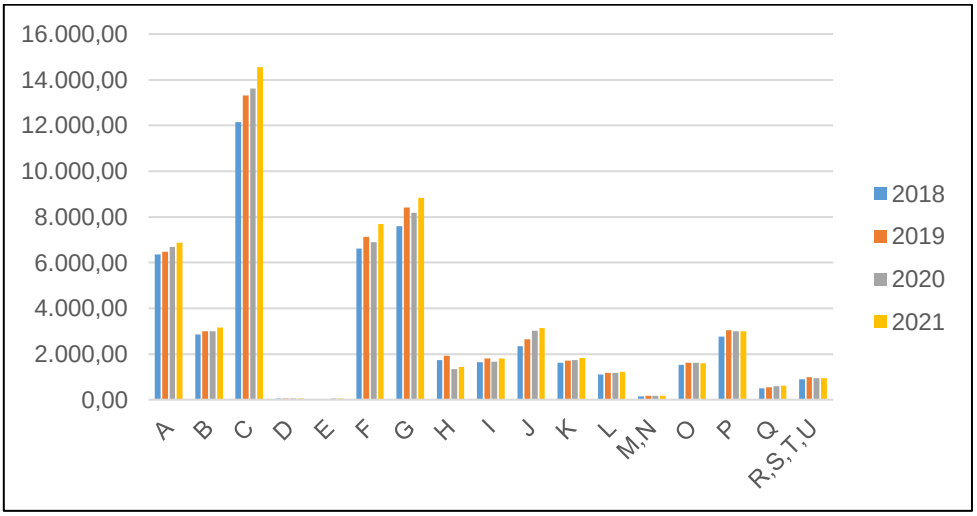

Sumber : BPS,2017-2022

Keterangan Gambar :	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor jasa keuangan dan asuransi
H	Transportasi dan pergudangan
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum
J	Informasi dan komunikasi
K	Jasa keuangan dan asuransi
L	Real estat
M,N	Jasa perusahaan
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib
P	Jasa pendidikan
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
R,S,T,U	Jasa lainnya

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah tersebut. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerah tersebut tinggi.

Grafik 1.4.
PDRB per Kapita Kabupaten banyumas Tahun 2018-2021 (juta rupiah)

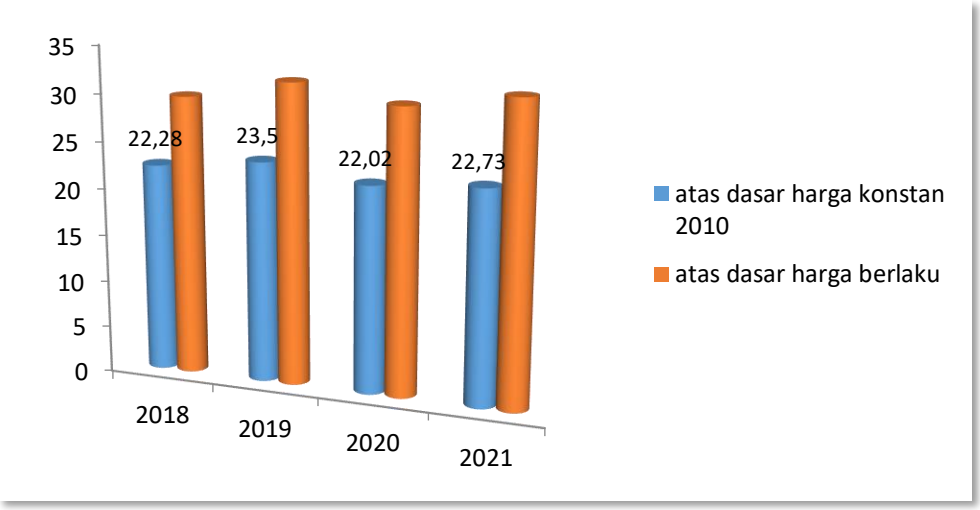

Sumber : BPS Kab. Banyumas 2018-2022

2. Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum inflasi di Kabupaten Banyumas terkendali, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan mendorong inflasi yang tinggi.

Grafik 1.5.
Inflasi Kabupaten Banyumas (%) Tahun 2018-2021

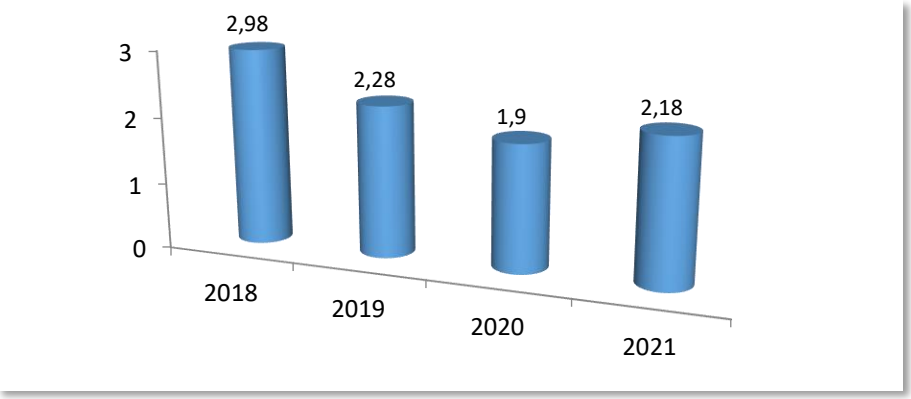

Sumber : BPS,2017-2022

3. Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Banyumas selama periode 2017-2021, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.5.
Banyaknya Penduduk Usia Kerja menurut Karakteristik Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	863.224	868.553	877.555	865.982
Bekerja	827.086	832.017	824.866	813.592
Pengangguran	36.138	36.536	52.689	52.390
Bukan Angkatan Kerja	415.642	425.859	438.944	464.824
Sekolah	98.634	92.940	94.202	89.693
Mengurus Rumah Tangga	265.411	278.936	282.836	306.325
Lainnya	51.597	53.983	61.906	68.806

Sumber : BPS, 2017-2022

J. SOSIAL BUDAYA

1. Penduduk

Berdasarkan data dari BPS, penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 berjumlah 1.789.630 orang, terdiri dari 900.919 (50,34%) orang laki-laki dan 888.711 (49,66%) orang perempuan. Dari jumlah penduduknya, terlihat 3 (tiga) kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah penduduknya yaitu Kecamatan Cilongok sebanyak 125.349 (7%) orang, Kecamatan Ajibarang sebanyak 102.808 orang (5,74%), dan Kecamatan Sumbang sebanyak 94.438 orang (5,28%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Purwojati sebanyak 37.347 orang (2,09%).

2. Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Dengan melihat dari harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.

Grafik 1.6.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyumas Tengah Tahun 2018-2021

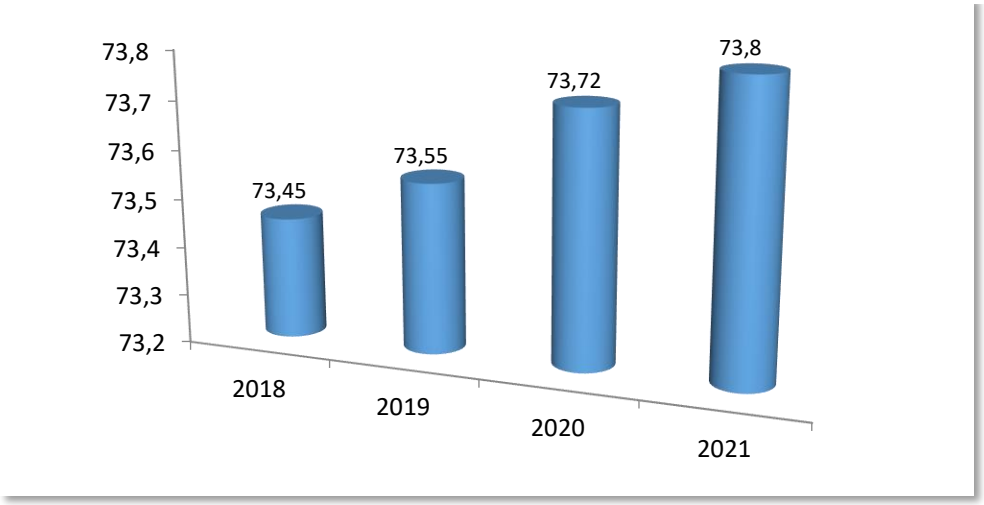

Sumber : BPS,2017-2022

K. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa dating. Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu strategis yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sehingga mengancam status kesehatan masyarakat. Penularan dan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif.

Pembelajaran dari pandemi COVID-19 adalah bagaimana mendorong penguatan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penguatan ketahanan kesehatan *(health security)* melalui pengendalian penyakit, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur merupakan isu nasional yang juga menjadi isu daerah ketersediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur juga merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-9 yaitu Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi serta Tujuan SDG's/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus berupaya melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas berbagai sarana dan prasarana baik berupa jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, pemukiman serta transportasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan eknonomi yang lebih mantap. Namun demikian akibat adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 berakibat pada terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas. Termasuk juga tertundanya pembangunan infrastruktur strategis di Banyumas yang mendukung pada proyek strategis nasional. Tertundanya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Permasalahan pengembangan potensi daerah adalah belum teridentifikasinya seluruh potensi Kabupaten Banyumas yang ada agar dapat dikembangkan secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi

daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin justru mengalami kenaikan. Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberi dampak multisektoral.

Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek ketrampilan dan produktivitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah dan nasional. TPT Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 4,21% sedangkan tahun 2020 adalah sebesar 6%. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga dikarenakan dampak COVID-19 yang mengakibatkan adanya pengurangan tenaga kerja ataupun Pemutusan Hubungan Kerja di banyak perusahaan serta pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat dan kompetitif dan saling menguntungkan, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas dipersepsikan dengan Ketahan Pangan. Dimana upayanya adalah meningkatkan ketersediaan pangan baik ketersediaan energi maupun protein.

Ketersediaan pangan utama dalam hal ini adalah untuk mencukupi ketersediaan energi dicukupi dari hasil produksi padi dan palawija sedangkan ketersediaan protein dicukupi dari produksi hasil peternakan yaitu daging, telur dan susu di Kabupaten Banyumas belum bisa mencapai kapasitas yang ditargetkan. Untuk mencapai target tersebut masih banyak kendala yang harus diatasi antara lain karena sempitnya kepemilikan lahan, menurunnya kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, serangan OPT, iklim yang tidak menentu dan kurang menguntungkannya budidaya padi dibandingkan dengan budidaya hortikultura.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap serta masalah alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan perawatan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang mendapat perhatian cukup serius dalam proses pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional yaitu isu terkait lingkungan hidup dan bencana meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, dan kelangkaan energi.

Belum adanya regulasi terkait sumber mata air di Kabupaten Banyumas menyebabkan pengelolaan sumber daya alam menjadi belum maksimal, salah satunya dalam mengelola kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20% dari luas wilayah perkotaan dan 10% RTH Privat di Perkotaan, Radius 200 meter dari mata air harus dilindungi dan perbukitan sebagai daerah konservasi.

Permasalahan lingkungan lain yang masih perlu perhatian adalah pengelolaan sampah. Pelayanan penanganan sampah masih terpusat pada kawasan perkotaan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran dan kesadaran mayarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengelolaan berbasis masyarakat.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, Meningkatnya birokrasi yang kapabel, Meningkatnya pelayanan publik yang prima antara lain Pelayanan Pemerintah Daerah dalam memberikan akses informasi publik dan pelayanan aduan masyarakat menjadi indikator dalam pencapaiannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlu adanya road map Reformasi Birokrasi, Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan kompetensi SDM aparatur, keterbukaan dan transparansi informasi, pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT serta komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu juga diperlukan kapasitas fiskal yang besar terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu isu strategis tata kelola pemerintahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah, peningkatan peran dan daya saing pemuda serta peningkatan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain terkait kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, di awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar dan multi sektor. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi COVID-19.

Dinamika kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran juga turut mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika kebijakan nasional. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah : ***"MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI"*.**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju : Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan

pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

Adil-Makmur : Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

Mandiri : Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai

tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2. MISI

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu :

a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut

a. **Tujuan 1** : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasarannya sebagai berikut :

1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2) Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
3) Meningkatnya pelayanan publik yang prima.

b. **Tujuan 2** : Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:

1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
4) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

c. **Tujuan 3** : Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasarannya yaitu : Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

d. **Tujuan 4** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, dengan sasarannya sebagai berikut:

1) Meningkatnya pertumbuhan industry pengolahan dan perdagangan.
2) Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani.

e. **Tujuan 5** : Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama.

f. **Tujuan 6** : Perwujudan pembangunan kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan sasarannya sebagai berikut:

1) Meningkatnya investasi daerah.
2) Meningkatnya kesempatan berusaha.

3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup.
4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan.
5) Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim

g. **Tujuan 7** : Meningkatkan ketersediaan dan kaulitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai.

h. **Tujuan 8** : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sasarannya sebagai berikut:
1) Meningkatnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal.
2) Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

i. **Tujuan 9** : Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:
1) Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
2) Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.
3) Meningkatnya peran dan daya saing pemuda.

Penjabaran misi, tujuan, sasaran indikator kinerja dan target indikator kinerja dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
1.	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Indek Reformasi Birokrasi			70,00
				Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	100%
					Nilai Akuntabilitas Kinerka Instansi Pemerintah (SAKIP)	76,00
					Nilai Survey Esktrernal Persepsi Korupsi	3,86
					Nilai Maturitas SPIP	Level 2
				Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,10
					Nilai Keterbukaan Insformasi Publik (KIP)	95
				Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	81
2.	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			72,18
				Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,53 tahun
					Harapan Lama Sekolah	12,87 tahun
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,73 tahun
				Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,84%
				Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,65
					Nilai Kabupaten Layak Anak	600

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
		Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin			12,51%
				Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
					Persentase lingkungan permukiman yang layak huni	86,17%
					Persentase penanganan korban bancana	100%
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	Pertumbuhan Ekonomi			4,10%
				Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan ecer; reparasi mobil dan sepeda motor	4,49%
					Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5,83%
				Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian kehutanan dan perikanan	2,26%
			PDRB per Kapita			32,332 juta rupiah
4.	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan			74,02
				Meningkatnya inovasi produk dan tata Kelola hasil tanaman pangan dan	Persentase ketersediaan pangan utama	96%

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
				agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama		
5.	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah			2%
				Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi daerah	500 Milyar Rupiah
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			5,75%
				Meningkatnya kesempatan berusaha	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,66%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			63,97
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,97
					Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	24%
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	99,983%
				Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	185
6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang	Persentase Kinerja Infrastruktur			53,31%
				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	33,335%
					Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan	73,29%

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
	daya ungkit pembangunan	kesejahteraan masyarakat			Umum dan Penataan Ruang	
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi Pariwisata terhadap PAD			4%
				Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	5,48%
					Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	5%
				Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi sehat	28,88%
					Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,244%
8.	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas			1,656 per 10,000 penduduk
				Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	Persentase kriminalitas yang tertangani	50%
				Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	Persentase pelestarian budaya Banyumas	68,68%
				Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	2,59%

Sumber data: Perubahan RPJMD Kab. Banyumas 2018-2023

B. PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”, maka telah disusun arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.

Tabel 2.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Perubahan Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas pelayanan dasar, memantapkan kondusifitas wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan	Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Daya Saing Potensi Daerah untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Masyarakat	Penguatan Daya Saing Menuju Daerah yang Maju dan Mandiri	Peningkatan Perekonomian Daerah didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	Perwujudan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil-Makmur	Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Banyumas yang Maju, Adil dan Mandiri
Prioritas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public 2. Penurunan kemiskinan dan pengangguran 3. Peningkatkan keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan social	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan ketersedian dan kualitas infrastruktur 3. Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat 4. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pemenuhan infrastruktur dasar 3. Pengembangan dan pemerataan kegiatan ekonomi	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi 3. Pengembangan Potensi Daerah dan	Prioritas 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 2. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung investasi 3. Pengembangan teknologi untuk kegiatan ekonomi masyarakat 4. Optimalisasi model programprogr	Prioritas 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13) 2. Percepatan penanggula	Prioritas 1. Penguatan kualitas sumber daya manusia menuju smart people dengan pemanfaatan teknologi informasi 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah 3. Pemanfaatan tekhnologi dalam pengembanga	Prioritas 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13) 2. Pemantapan Percepatan penanggulangan kemiskinan (TPB 1 dan 10) 3. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Perubahan Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
4. Peningkatan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun 5. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pusatpusat pertumbuhan ekonomi 6. Pengurangan ketimpangan akibat disparitas pendapatan masyarakat 7. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha 8. Peningkatan peran koperasi, industri kecil menengah dan usaha	penganggur an 5. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan 6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjuta n 7. Peningkatan tata kelola pemerintaha n dan kualitas pelayanan publik	masyarakat 4. Pengemba ngan model programpro gram penanggul angan kemiskinan 5. Pemantapa n produktivita s pertanian untuk mendukun g kedaulatan pangan 6. Pengelolaa n sumber daya alam dengan memperhat ikan kualitas lingkungan hidup 7. Pemantapa n tata kelola pemerintah an	pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat 4. Penanggula ngan kemiskinan dan Penganggur an untuk Mengurangi Kesenjanga n 5. Pengelolaa n lingkungan hidup dan Peningkata n Ketahanan Bencana 6. Pemantapa n tata kelola pemerintah an	am penanggulan ga n kemiskinan 5. Diversifikasi produk pertanian dan nilai tambah hasil pertanian 6. Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatik a n kualitas lingkungan hidup 7. Pengembang an smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	ngan kemiskinan (TPB 1 dan 10) 3. Peningkata n kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3, 4 dan 5) 4. Peningkata n kualitas infrastruktur untuk memperkua t daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11) 5. Pengemba ngan smart goverment dalam peningkata n kualitas pelayanan publik (TPB 16)	n produk unggulan daerah, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat 4. Penerapan model program penanggulang an kemiskinan berbasis sumberdaya local 5. Optimalisasi produk pertanian untuk kesejahteraan masyarakat 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	daerah (TPB 6, 9 dan 11) 4. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3,4 dan 5) 5. Perwujudan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16) 6. Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal (TPB 8) 7. Peningkatan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Perubahan Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan Tahun 2023
mikro kecil menengah 9. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan 10. Pengembangan pariwisata 11. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 12. Pengurangan resiko bencana dan peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana						7. Penguatan smart goverment dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	nilai nasionalisme dan religius

Sumber Data : Perubahan RPJMD Kab Banyumas 2018-2023

Sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Banyumas Tahun 2021, disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi.
3. Pengembangan Potensi Daerah dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran untuk Mengurangi Kesenjangan.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana.
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan.

Mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 program Unggulan Bupati-Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
3. Program Pengelolaan Pendidikan.
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
5. Program Pengembangan Ekspor.
6. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
7. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
8. Program Promosi Penanaman Modal.
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
10. Program Penempatan Tenaga Kerja.
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
12. Program Penyelenggaraan Jalan.
13. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
14. Program Pengembangan UMKM.
15. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
16. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
17. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kebijakan umum perencanaan pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kebijakan perencanaan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Perubahan ini juga sebagai penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 tersebut terutama ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2022 dan 2023. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berupa penyesuaian program kegiatan dalam RPJMD, perbaikan indikator dan target, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta perbaikan pengukuran kinerja daerah dan Perangkat Daerah (cascading).

Mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2021 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Perubahannya Tahun 2021, telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target sebelum perubahan RPJMD	Perubahan RPJMD	Keterangan
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	70	70	Tetap
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	73,15	72,18	Penyesuaian target
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1.	Persentase penduduk miskin	%	10,54	12,51	Penyesuaian target
		2.	Indeks Gini	Indeks	0,306	-	Tidak menjadi target
		3.	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,3336	-	Tidak menjadi target
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	1.	Pertumbuhan Ekonomi/Persentase pertumbuhan PDRB	%	6,5	4,1	Penyesuaian target
		2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	101,84	101,84	Tidak menjadi target
		3.	PDRB per kapita	Juta Rp.	34,885	32,332	Penyesuaian target
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan		Indeks	74,02	74,02	Tetap
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	2	Tetap
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,97	63,97	Tetap

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target sebelum perubahan RPJMD	Perubahan RPJMD	Keterangan
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Daya Saing Infrastruktur		%	82,25	-	Penyesuaian indikator, formulasi dan target
		Persentase Kinerja Infrastruktur		%	-	53,31	Pengganti
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata (wisaman dan wisnus)	%	5,48	-	Penyesuaian indikator, formulasi dan target
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	-	4	Pengganti
		2.	Persentase pertumbuhan industri kreatif	%	5	5	Menjadi indikator sasaran daerah / indikator OPD
		3.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,06	5,75	Penyesuaian target
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1.	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	5	Menjadi indikator sasaran daerah / indikator OPD
		2.	Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	823	1,656	Penyesuaian formulasi dan target
		3.	Indeks Demokrasi	Indeks	80,31	80,31	Tidak menjadi target
		4.	Persentase pelestarian budaya Banyumas	%	68,68	68,68	Menjadi indikator

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target sebelum perubahan RPJMD	Perubahan RPJMD	Keterangan
							sasaran daerah / indikator OPD

Sumber Data : Perjanjian Kinerja, 2021

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2021, yang ditetapkan dengan :
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
   b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2021 ditetapkan :
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 .
   b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.078.019.897.857
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.939.847.627.963
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	32.831.336.425
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	57.097.628.418
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	22.962.124.813
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	96.021.298.275
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	390.482.426.738

No.	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	19.833.417.851
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	48.222.039.008
	JUMLAH	**3.685.317.797.348**

Sumber Data : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Progam dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja Intansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan predikat kinerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
TUJUAN 1						
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	N/A	N/A	**N/A**
TUJUAN 2						
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,44	100,36	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 3						
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan						
3.	Persentase penduduk miskin	%	12,51	13,66	90,81	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 4						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian						
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,1	4	97,56	**Sangat Tinggi**
5.	PDRB per Kapita	Juta rupiah	32,332	31,81	98,39	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 5						
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
6.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,02	79,97	108,04	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 6						
Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
7.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	1,35	67,5	**Sedang**
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,75	6,05	94,78	**Sangat tinggi**
9.	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,97	72,83	113,85	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
10.	Persentase	%	53,31	54,135	101,55	**Sangat**

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
	Kinerja Infrastruktur					**Tinggi**
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4	5,2	130	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						
12.	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,656	1,22	126,33	**Sangat Tinggi**
RATA-RATA CAPAIAN					**102,65**	**Sangat Tinggi**
Keterangan : N/A Angka Kinerja Tahun 2021 belum tersedia						

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah sebesar **102,65**% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.
Predikat Kinerja Tahun 2021

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat tinggi	10	90,91
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	1	9,09
4	Rendah	-	-
5	Sangat rendah	-	-
	Jumlah IKU	**11**	**100**

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

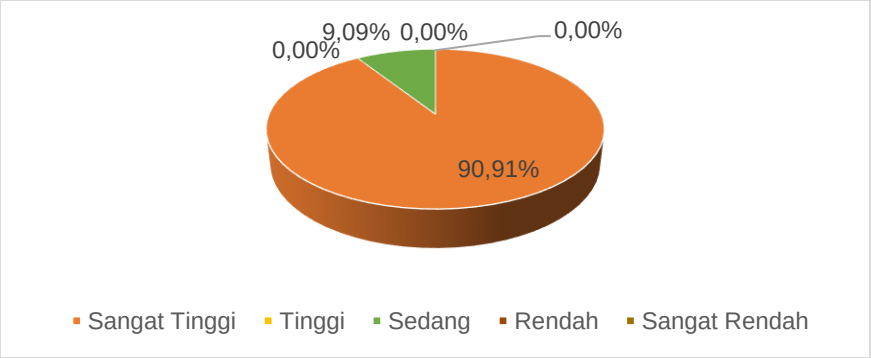

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2021

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. TUJUAN 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola *(governance)* tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas nomor 70 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dimana Misi pertama yaitu *"Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik"*.

Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh tim dari Kemenpan dan RB, namun sampai dengan selesai disusunnya laporan kinerja ini belum ada hasil evaluasi yang diperoleh. Sehingga capaian indeks reformasi yang disajikan pada laporan ini merupakan hasil evaluasi tahun 2020. Capaian indikator indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banyumas 2020 adalah sebesar 69,07 atau sebesar 101,57% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 telah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, namun demikian hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi belum tersedia.

Capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 69,07. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A.	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	20,00	11,62
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	8,18
	III. Reform	30,00	15,20
Total Komponen Pengungkit (A)		**60,00**	**33,00**
B.	**Komponen Hasil**		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,17
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,48
3.	Pemerintahan yang Bersih dna Bebas KKN	10,00	9,63
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,79
Total Komponen Hasil (B)		**40,00**	**36,07**
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		**100,00**	**69,07**

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten banyumas telah berkomitmen untuk melaksanakan implementasi reformasi birokrasi sampai dengan perangkat daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2018 sebesar 66,68 naik di tahun 2019 menjadi sebesar 68,76 dan naik kembali di tahun 2020 sebesar 69,07 dengan kategori “B”.

Keberhasilan peningkatan nilai Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan melalui upaya :

a) Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi diselaraskan dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2025;.
b) Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD;

c) Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi tingkat OPD;

d) Mengoptimalkan implementasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan melakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas;

e) Meningkatkan pengetahuan terhadap assessor PMPRB Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan;

f) Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan;

g) Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

h) Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.

Tercapainya tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik didukung melalui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Program dan Anggaran Tujuan 1 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	295.812.336.322	250.919.308.902	84,82
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.316.016.696	3.920.983.279	73,76
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	721.474.710.848	705.238.013.986	97,75
4	Program	1.840.275.600	1.422.425.930	77,29

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.665.298.278	11.428.381.098	68,58
6	Program Kepegawaian Daerah	3.546.774.000	2.911.157.769	82,08
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	988.551.238	878.960.887	88,91
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.122.183.621	7.504.914.481	92,40
9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.464.848.651	1.237.964.460	84,51
10	Program Pengelolaan Arsip	130.250.000	115.972.800	89,04
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.125.000.000	861.209.087	76,55
12	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.901.796,655	821.154.966	21,05
13	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	503.908.000	480.018.400	95,26
14	Program Penyelenggaraan Pengawasan	870.811.301	752.003.472	86,36
15	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	351.010.000	283.027.728	80,63

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
16	Program Aplikasi Informatika	1.529.200.000	1.453.320.836	95,04
17	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	165.846.100	155.891.969	94,00
18	Program Informasi dan Komunikasi Publik	399.468.375	396.169.012	99,17
19	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	22.500.000	22.480.000	99,91
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.152.954.890	1.016.571.056	88,17
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	647.196.000	545.574.950	84,30
22	Program Peningkatan Kerjasama Desa	18.000.000	14.897.000	82,76
23	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14.908.250	13.379.250	89,74
24	Program Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan	353.672.800	321.396.300	90,87
25	Program Pendaftaran Penduduk	709.386.400	636.164.990	89,68
26	Program Pencatatan Sipil	64.944.550	59.263.600	91,25
27	Program Penataan Desa	487.700.000	244.480.990	50,13
28	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	699.269.300	566.677.841	81,04
29	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	890.039.440	634.232.691	71,26

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
30	Program Pelayanan Penanaman Modal	134.159.250	115.485.250	86,08
31	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	346.305.570	291.055.064	84,05
32	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.368.779.067	4.079.887.537	93.39

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.1.
Penerimaan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2020

2. TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target di tahun 2021 sebesar 72,18, realisasi sebesar 72,44, dan prosentase capaian sebesar 100,36%.

Peningkatan indikator kinerja IPM Kabupaten Banyumas tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021

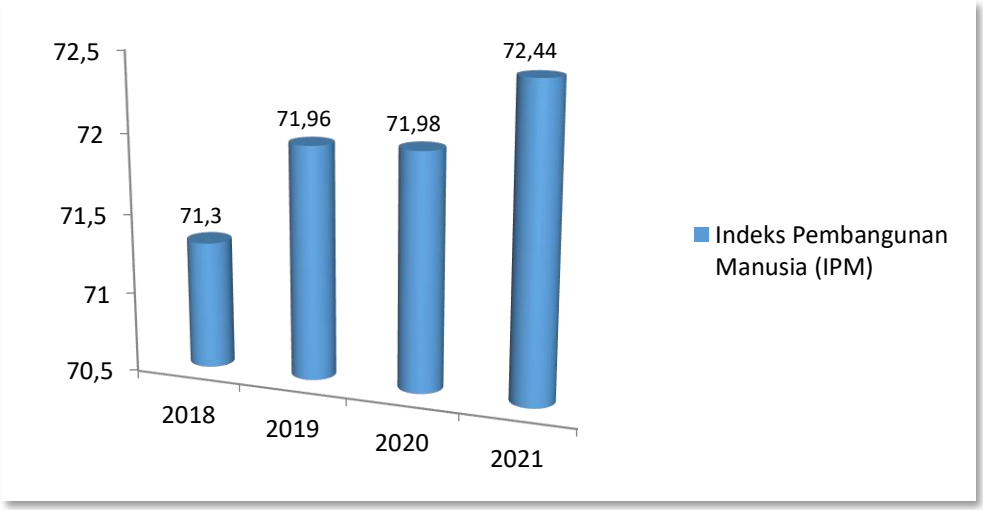

Sumber : RPJMD Th 2018-2023 Kab.Banyumas,2021

Capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia untuk tahun 2021 yaitu 72,44, dari target sebesar 72,18 atau mencapai 100,36%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2021 ini mencapai 96,59%.

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun dengan IPM wilayah kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai IPM paling tinggi. Peringkat kedua dicapai oleh Kabupaten Cilacap, peringkat ketiga Kabupaten Purbalingga dan terakhir Kabupaten Banjarnegara. Tingginya IPM Banyumas dibanding Kabupaten terdekat menunjukkan bahwa Banyumas selangkah lebih maju dalam hal pembangunan manusia di bidang pendidikan maupun kesehatan. IPM Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 72,44 berada di atas rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2017 angka IPM Banyumas selalu naik, artinya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Banyumas telah terwujud.

Grafik 3.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah dan Tahun 2021

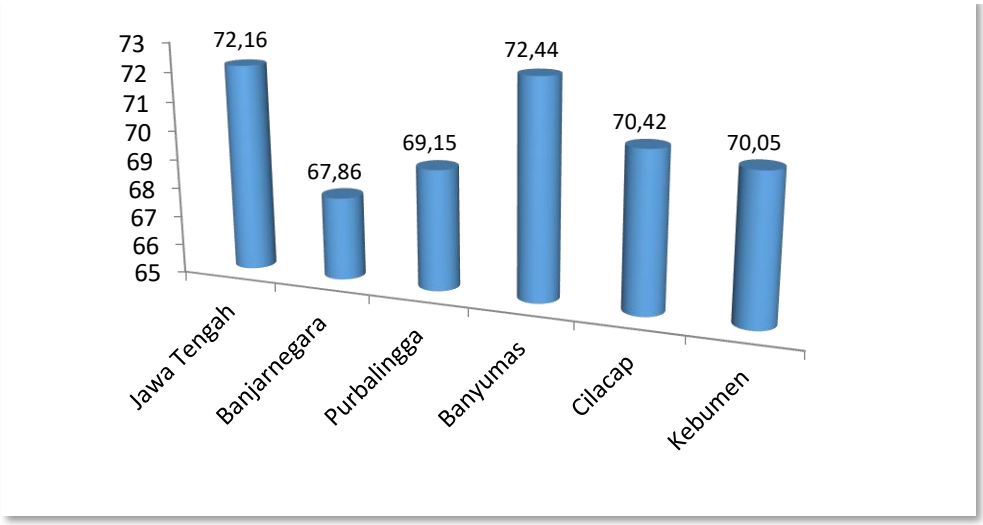

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak Komponen Indeks Pembangunan Manusia :

a) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

   Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

c) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan hidup (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan).

d) Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan.

Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

Komponen IPM	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Lama Sekolah	12,63	12,64	12,82	12,85	13,03
Rata-rata Lama Sekolah	7,40	7,41	7,42	7,52	7,62
Usia harapan hidup	73,33	73,45	73,55	73,72	73,8
Pengeluaran Perkapita Disesuikan	10.713	11.240	11,703	11.448	11.546
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**70,75**	**71,30**	**71,96**	**71,98**	**72,44**

Sumber : BPS Kab. Banyumas, 2021

Tercapainya tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat didukung melaui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Program dan Anggaran Tujuan 2 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	37.723.040.000	37.676.094.529	99,88
2	Program Pembinaan Perpustakaan	214.023.950	188.018.581	87,85
3	Program Pengelolaan Pendidikan	246.020.500.423	235.775.093.179	95,84
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.430.440.680.621	1.300.651.290.960	90,93
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	195.068.499.485	175.296.471.955	89,86
6	ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	19.424.676.741	12.295.967.987	63,30
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	464.217.463	298.279.352	64,25
8	Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	314.014.000	230.525.720	73,41
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	8.610.648.280	6.379.641.058	74,09
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	905.143.000	52.6031.000	58,12
11	Program Pengendalian Penduduk	39.948.600	36.605.475	91,63
12	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	59.860.000	54.075.000	90,34
13	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	64.538.100	59.456.100	92,13
14	Program Perlindungan Perempuan	195.703.500	87.453.500	44,69
15	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	20.948.800	19.568.750	93,41
16	Program Perlindungan Khusus Anak	281.185.000	100.499.000	35,74

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.2.
Peresmian Pembangunan Fasilitas Kesehatan oleh Bupati

Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2021

Gambar 3.3.
Bupati Melakukan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaan Tatap Muka

Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2021

3. TUJUAN 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Setelah perubahan RPJMD 2018-2023 di tahun 2021, maka dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pembangunan yang beradilan Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu

Persentase Penduduk Miskin dengan target di tahun 2021 sebesar 12,51, realisasi sebesar 13,66, dan prosentase capaian sebesar 90,81%.

Grafik 3.4.
Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2021

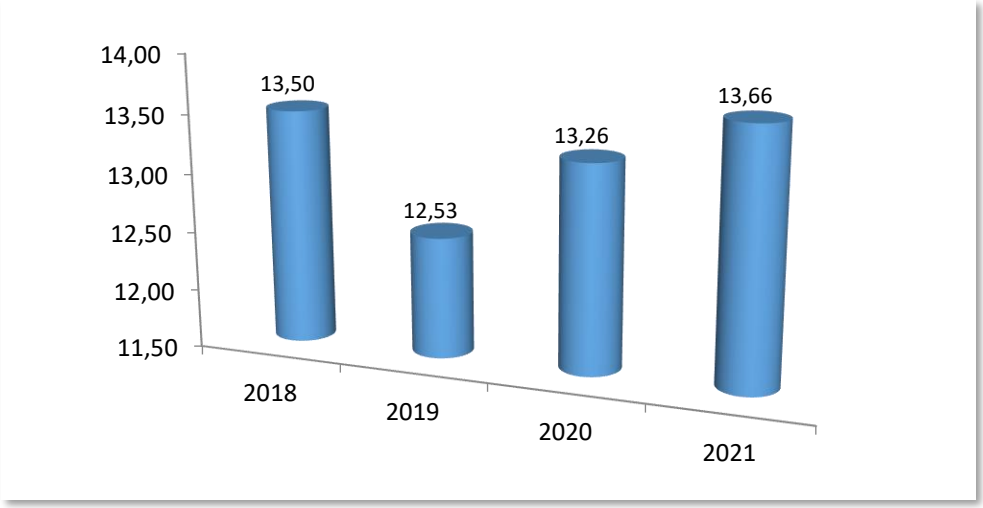

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Capaian kinerja tujuan meningkatkan meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dengan indikator Indeks Persentase Penduduk Miskin untuk tahun 2021 yaitu 13,66%, dari target sebesar 12,51% atau mencapai 90,81%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2021 ini mencapai 75,82%.

Pada tahun 2018 capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas memenuhi target yang ditentukan dalam perencanaan daerah, sedangkan pada tahun 2019 hanya memenuhi 99,84% dari target, pada tahun 2020 hanya tercapai 85% dari target dan pada tahun 2021 dapat terpenuhi 90,81% dari target. Adapun jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 20187 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banyumas dari Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	226,23	13,50
2019	211,65	12,53
2020	225,84	13,26
2021	232,91	13,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dibandingkan dengan kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas (BARLINGMASCAKEB : Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), nilai Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap. Adapun grafik Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

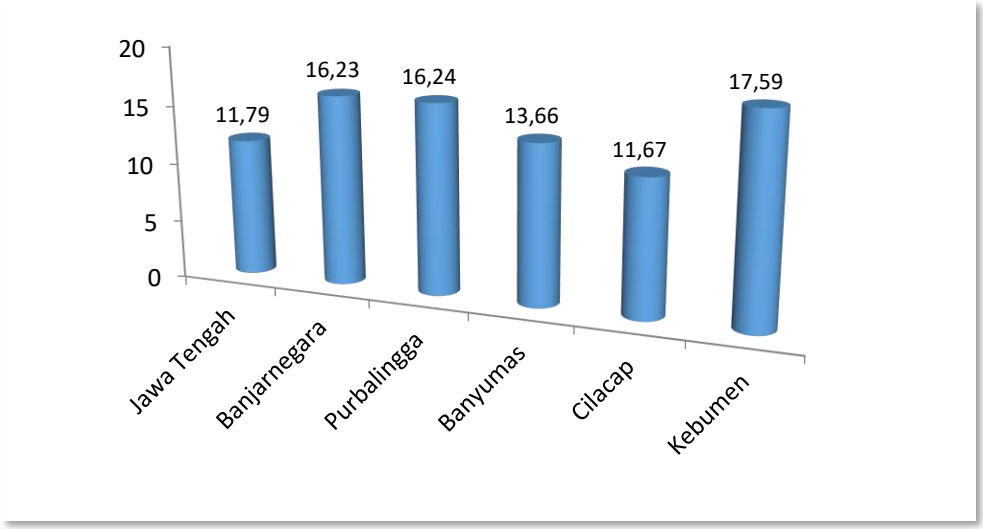

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kenaikan persentase kemiskinan di Kabupaten Banyumas dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Ditambah lagi dengan pemberlakukan sistem belajar dari rumah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan banyak karyawan yang bekerja di rumah/*Work From Home* (WFH) akibatnya pedagang yang biasa berjualan di sekolahan dan lingkungan perkantoran banyak yang kehilangan pekerjaan/berkurang pendapatannya.

Tercapaianya tujuan meningkatkan pembangunan yang berkeadilan didukung melalui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Program dan Anggaran Tujuan 3 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	150.000.000	143.210.591	95,47

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.489.005.362	1.283.616.410	86,21
3	Program Rehabilitasi Sosial.	635.336.744	515.758.582	81,18
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.168.531.669	7.935.856.869	97,15
5	Program Pemberdayaan Sosial	603.543.100	596.764.800	98,88
6	Program Penanganan Bencana	60.499.900	60.287.500	99,65
7	Program Pengembangan Perumahan	14.894.996.000	14.792.063.489	99,31
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	61.311.000	49.774.307	81,18
9	Program Kawasan Permukiman	6.768.112.650	6.717.020.424	99,25

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.4.
Bupati Memberikan Pemberian Bantuan Pembiayaan Kesehatan

Gambar 3.5.
Penanganan Korban Bencana Alam

4. TUJUAN 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Setelah perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 di tahun 2021, maka dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021, kendati masih terimbas dampak Pandemi Covid-19, ternyata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas mulai bergairah. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 4%, dibanding tahun 2020 masih di angka minus 1,65 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas untuk tahun 2021 yaitu 4%, dari target sebesar 4,1, dan prosentase capaian sebesar 97,56%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, di antaranya dipicu dengan banyaknya kegiatan pembangunan infrastruktur terkait proyek konstruksi, terutama berkait dengan pengembangan sektor pariwisata dari program dana pemulihan eknomi nasional (PEN).

Peningkatan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas thaun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2021

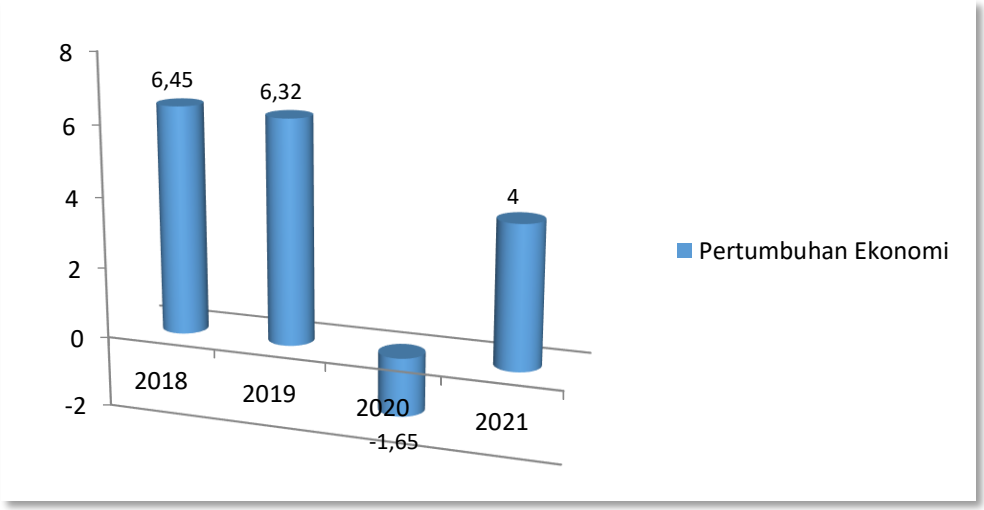

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Capaian kinerja dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi untuk tahun 2021 yaitu 4%, dari target sebesar 4,1 atau mencapai 97,56%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2021 ini mencapai 80%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2017-2021 fluktuatif dengan trend lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah yaitu pada tahun 2021 sebesar 4%, masih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah yang 3,32% dan Nasional 3,69% yang disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 3.7.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

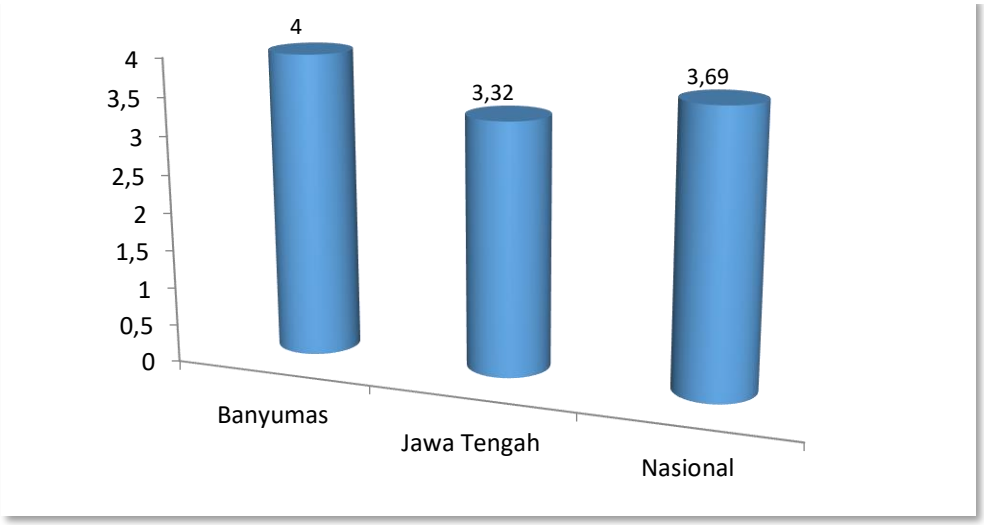

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Dari 17 (tujuh belas) sektor ekonomi di Banyumas, tahun 2021, tertinggi disumbang dari sektor konstruksi mencapai 7,62 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (6,06 persen), kemudian pengadaan listrik dan gas (5,74 persen). Ini menandakan sektor idustri juga mulai bergerak. Selanjutnya pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang (5,66 persen).

Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas, tahun 2017 s.d 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

	Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,17	2,97	0,31	1,51	0,94
B	Pertambangan dan Penggalian	4,55	4,27	3,34	-2,21	4,45
C	Industri Pengolahan	5,13	6,37	7,99	-0,05	3,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,36	6,76	5,16	2,55	5,74

	Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,54	5,43	4,17	4,15	5,66
F	Konstruksi	9,84	8,63	4,30	-3,71	7,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,59	7,22	8,11	-3,70	6,06
H	Transportasi dan Pergudangan	6,24	6,47	7,97	-31,84	2,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	5,57	7,76	-7,08	5,61
J	Informasi dan Komunikasi	15,09	9,50	11,74	13,81	4,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,46	3,99	4,29	1,59	1,22
L	Real Estate	8,34	5,57	5,48	-0,37	2,66
M,N	Jasa Perusahaan	7,52	8,39	10,08	-5,26	2,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	3,36	3,64	-1,34	0,07
P	Jasa Pendidikan	7,52	8,44	8,10	-0,26	0,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90	9,51	7,28	7,83	1,94
R,S,T, U	Jasa lainnya	9,32	9,08	9,05	-5,44	0,62

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pemulihan perekonomian tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 terus berlanjut hingga triwulan IV. PDRB per kapita Kabupaten Banyumas untuk tahun 2021 yaitu Rp. 31,81 juta, dari target sebesar Rp 31,455 juta, dan prosentase capaian sebesar 98,39%. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 22,73 juta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp. 22,02 juta. Demikian juga dengan PDRB per kapita Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar Rp. 31,81 juta yang mengalami

peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 30,21 juta.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerah tersebut tinggi.

Grafik 3.8.
PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

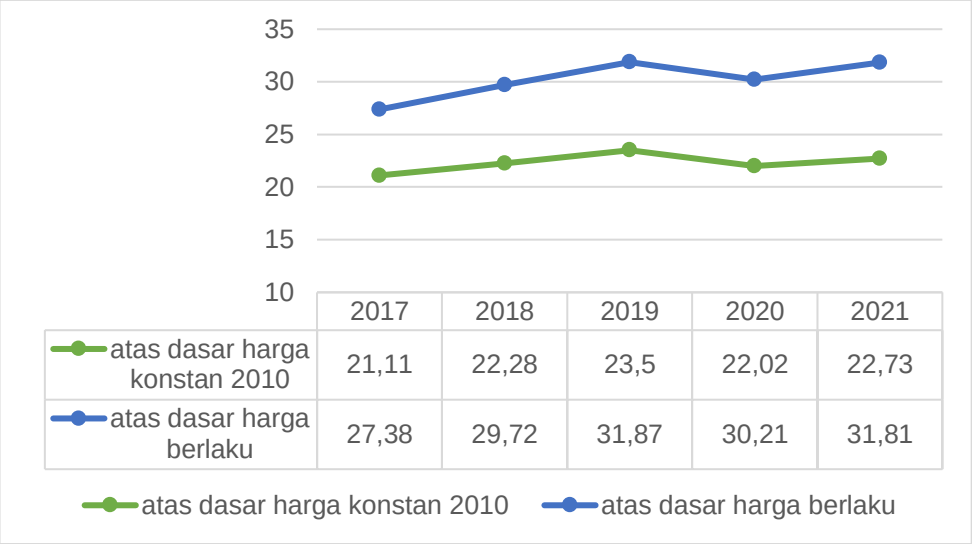

	2017	2018	2019	2020	2021
atas dasar harga konstan 2010	21,11	22,28	23,5	22,02	22,73
atas dasar harga berlaku	27,38	29,72	31,87	30,21	31,81

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Capaian kinerja dengan indikator PDRB per kapita untuk tahun 2021 yaitu Rp. 31,81 juta, dari target sebesar Rp 31,455 juta, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2021 mencapai 98,39%.

Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, terlihat bahwa PDRB Perkapita Banyumas tahun 2021 sebesar 31,81 Juta Rupiah dan merupakan Kabupaten tertinggi kedua setelah Cilacap yang sebesar 56,15 Juta Rupiah dan jika dibandingkan dengan Jawa Tengah masih dibawah PDRB Perkapita Jawa Tengah yang sebesar 38,67 Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Banyumas rata-rata berpendapatan 31,81 Juta Rupiah setahun dan masih merupakan Kabupaten dengan perkembangan perekonomian yang masih menjanjikan.

Grafik 3.9.
PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (juta rupiah)

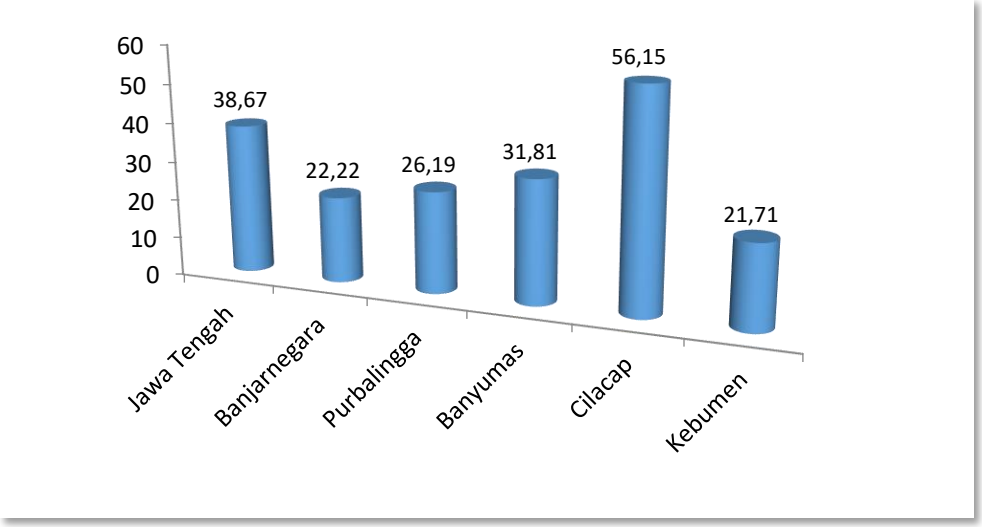

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas, beberapa cara telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas di antaranya kegiatan pembangunan infrastruktur terkait proyek konstruksi, terutama berkait dengan pengembangan sektor pariwisata dari program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mengaktifkan orang masuk ke Kabupaten Banyumas melalui pendidikan, dan program investasi padat karya.

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian didukung melalui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Program dan Anggaran Tujuan 4 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai an
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.	15.000.000	14.837.500	98,92
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	937.416.400	682.743.006	72,83
3	Program Pengelolaan	82.479.772	77.229.772	93,63

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai an
	Sistem Informasi Industri Nasional			
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70.000.000	69.184.500	98,84
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.665.549.830	8.467.350.800	97,71
6	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	19.500.000	18.800.700	96,41
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	24.500.000	24.057.000	98,19
8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	310.000.000	295.095.463	95,19
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.033.202.511	33.844.664.031	96,61
10	Program Pengembangan Ekspor	22.000.000	21.881.000	99,46
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	43.375.000	42.325.300	97,58
12	Program Penyuluhan Pertanian	1.812.466.425	1.579.263.826	87,13
13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.648.760.300	1.182.526.650	71,72
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	22.139.800	19.723.750	89,09
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.264.710.650	1.181.663.465	93,43
16	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.724.761.600	5.640.019.836	83,87
17	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	30.669.880	28.822.650	93,98
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	138.643.650	121.941.930	87,95

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai an
19	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	232.452.600	191.379.215	82,33

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.6.
Pembangunan Destinasi Wisata Baru di Banyumas

Gambar 3.7.
Kunjungan Menteri Perindustrian ke KSU Nira Satria Pernasidi Cilongok

5. TUJUAN 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis telah ditetapkan indikator berupa Indeks Ketahanan Pangan. Capaian indikator indeks ketahanan pangan Kabupaten Banyumas 2021 adalah sebesar 79,97 atau sebesar 108,03% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 74,02. Capaian ini berada pada kelompok IKP tingkat 6 yang dapat diartikan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki ketahanan pangan yang sangat baik.

Peningkatan indikator kinerja ketahanan pangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.10.
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021

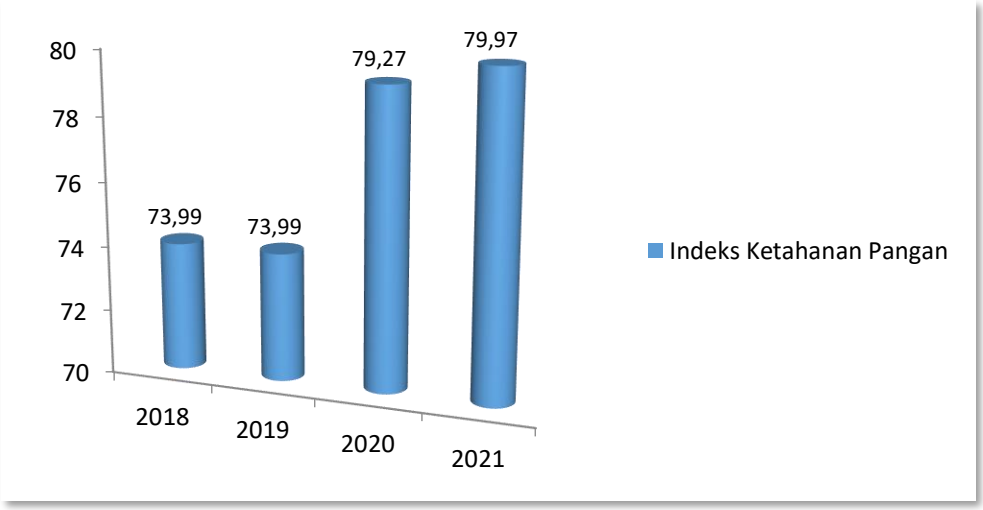

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2021

Capaian kinerja tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan untuk tahun 2021 yaitu 79,97%, dari target sebesar 74,02% atau mencapai 108,04%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) maka realisasi tahun 2021 ini mencapai 108,01%.

Dibandingkan dengan kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas (BARLINGMASCAKEB : Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap. Adapun grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut :

Grafik 3.11.
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021
dan Kabupaten Sekitar

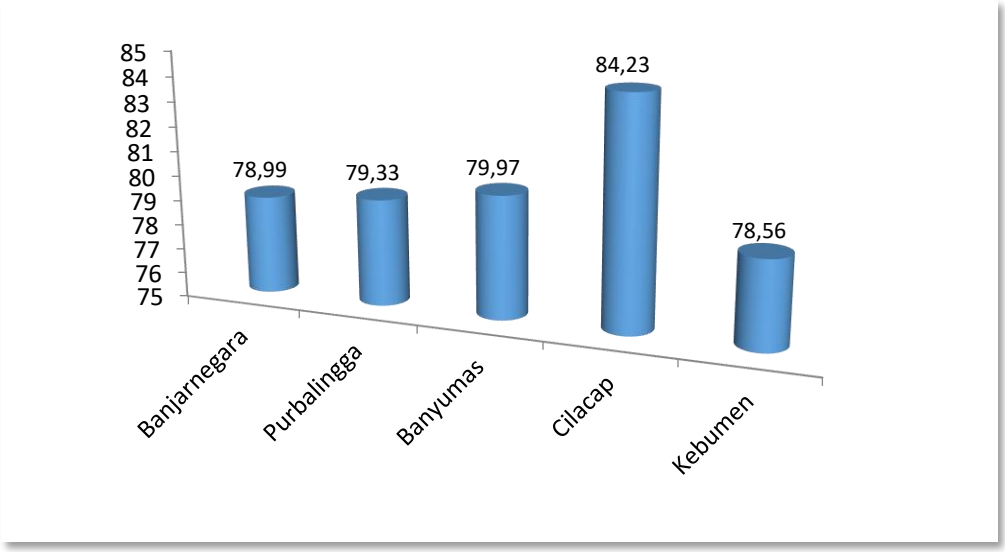

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2021

Ditengah pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman global saat ini, upaya yang berkelanjutan menjadi keharusan untuk mengantisipasi krisis pangan di tengah pandemi. Pemerintah Daerah lebih berperan sebagai fasilitator dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas meningkatkan indeks ketahanan pangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a) Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan sumber daya ekonomi, diversifikasi dan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan.
b) Meningkatkan kualitas SDM dan sarpras pendukung produksi pertanian dan peternakan.
c) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan perikanan serta nilai tambah olahan hasil perikanan.
d) Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan diversifikasi usaha, meningkatkan produksi dan olahan hasil, akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar.

Selain langkah-langkah tersebut, pencapaian tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis didukung melalui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Program dan Anggaran Tujuan 5 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	86.113.875	86.026.875	99,90
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.	624.000.000	620.847.025	99,49
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan.	10.000.000	9.487.000	94,87
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan.	29.999.999	29.879.550	99,60
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	22.212.010.939	21.777.517.973	98,04

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.8.
Bupati Banyumas Meresmikan Galeri Niaga Banyumas

Gambar 3.9.
Kunjungan Bupati Banyumas ke Kebun Melon Hidroponik di Kecamatan Purwojati

6. TUJUAN 6 : Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Setelah perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 di tahun 2021, dalam rangka mewujudkan tujuan Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja, maka ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Kabupaten Banyumas 2021 adalah sebesar 1,35% atau sebesar 67,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2%.

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi dan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.12.
Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2021

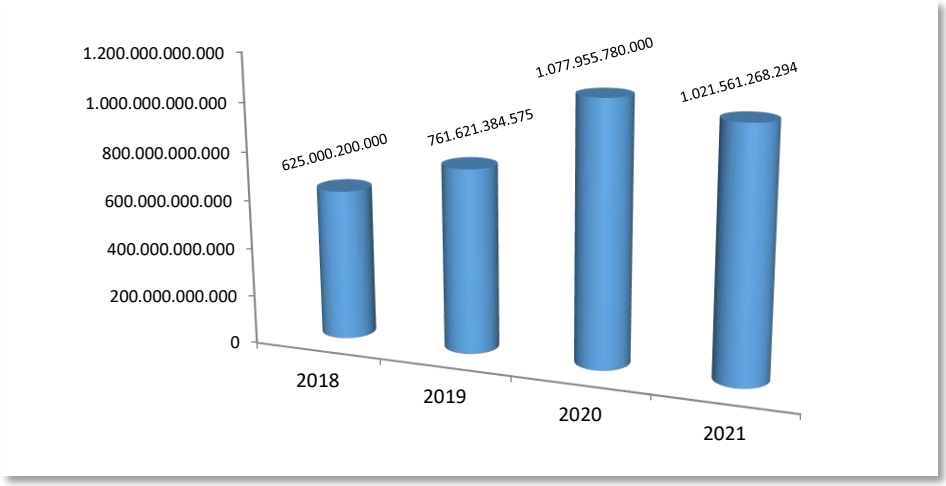

Sumber : RPJMD 2018-2023 Kabupeten Banyumas, 2021

Capaian Realisasi indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Tahun 2021 diatas, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 belum melampaui angka yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan nilai investasi tahun 2021 dari tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,23%, walaupun pencapaian tahun 2021 sudah melebihi target yang di tetapkan pada RPJMD 2018-2023 yaitu sebesar Rp 500 miliar. Pencapaian ini juga melampaui target investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 570 miliar.

Penurunan nilai investasi pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 disebabkan oleh :

1) Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Aproach* (OSS RBA) atau Sistem Informasi Perizinan Berbasis Risiko masih masih belum dapat digunakan sepenuhnya, dikarenakan masih terdapat perbaikan sistem dari Pemerintah Pusat.
2) Implementasi perizinan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) belum berjalan sesuai dengan ketentuan dikarenakan masih dalam proses perbaikan dan integrasi sistem dari pemerintah pusat melalui OSS RBA ;
3) Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan perubahan dari

Izin Mendirikan Bangunan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) belum dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga proses perizinan untuk sementara tidak dapat diterbitkan.

4) Pandemi Covid 19 menyebabkan kagiatan fasilitasi dan pendampingan pelaporan Kegiatan Penanaman Modal kurang optimal meskipun sudah dilakukan upaya pendampingan secara daring;
5) Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha dengan investasi besar rata-rata dilakukan oleh tim/divisi tersendiri di kantor utama yang biasanya ada di luar kota, sehingga tim fasilitasi kabupaten terkendala dengan informasi kontak person dan data terkini.
6) Penambahan realisasi investasi dari investor baru dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,00 rata-rata masih dalam tahap persiapan perencanaan konstruksi ;
7) Penambahan realisasi investasi dari investor lama rata-rata tidak ada kenaikan/penambahan baik modal tetap, seperti perluasan tanah/bangunan, peralatan kerja dll maupun modal kerja.

Pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2021 terdiri dari dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar pada sektor tersier dengan nilai investasi Rp 788.802.599.862,- dari total investasi sebesar Rp 1.021.561.268.294,-. Nilai capaian investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.
Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor
Tahun 2021

No.	Sektor	PMA	PMDN	JUMLAH
1	Sektor Primer	-	-	-
2	Sektor Sekunder	24.860.868.432	207.897.800.000	232.758.668.432
3	Sektor Tersier	306.599.862	788.496.000.000	788.802.599.862
JUMLAH		**25.167.468.294**	**996.393.800.000**	**1.021.561.268.294**

Sumber : DPMPTSP, 2021

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Banyumas antara lain :

1) Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan adanya Mal Pelayanan Publik, dimana proses perizinan dipermudah melalui sistem online.
2) Menyusun Peraturan Kepala Daerah terkait dengan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Banyumas.
3) Mengembangkan kawasan peruntukkan industri dengan memprioritaskan industri padat karya yang mempu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
5) Melaksanakan sosialisasi tentang informasi, pengaduan, data dan system informasi pelayanan perizinan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memiliki perizinan terhadap setiap usahanya sesuai peraturan peru dang-undangan yang berlaku.
6) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.
7) Mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta PTSP bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh instansi terkait baik tingkat provinsi maupun pusat.
8) Meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dengan membandingkan Jumlah Penganggur dengan Jumlah Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 tercatat 6,05% yang berarti bahwa dari 100 orang penduduk angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 naik 0,5% dibandingkan tahun 2020 dimana TPT nya tercatat 6%. Realisasi indikator kinerja TPT di tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 (akhir RPJMD) mencapai 65,56%.

Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 masih menggunakan data Tahun 2020, karena belum di rilis dari BPS, dimana Angkatan Kerja (AK) Kabupaten Banyumas sebesar 877.555 orang. Angkatan Kerja (AK) dihitung berdasarkan jumlah orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Sementara untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2021 sebesar 65,07% angka ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 66,66%. Capaian apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi sebagai berikut :

Grafik 3.13.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

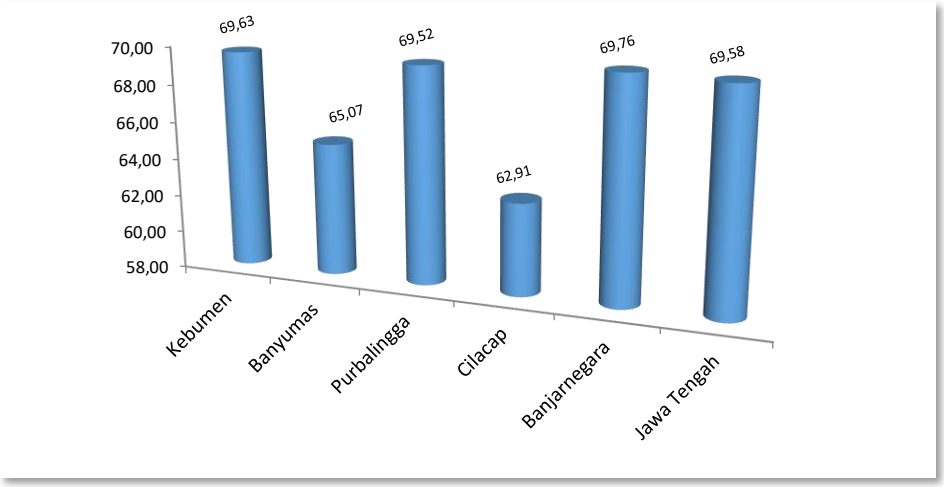

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 antara lain :

1) Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2) Kesempatan kerja masih kurang (lowongan kerja berkurang) sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor formal sangat kurang sedangkan angkatan kerja semakin bertambah;
3) Penyerapan penempatan dari event Job Fair masih kurang dikarenakan belum ada kesesuaian antara lowongan dan kompetensi pencari kerja;
4) Masih ada sisa pencari kerja pada tahun 2020 yang belum terserap ditambahkan sisa pencari kerja Tahun 2021;
5) Adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dikarenakan belum semua negara menerima pekerja dari luar negara, misalnya Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang yang sebelumnya adalah merupakan negara yang paling banyak diminati oleh pencari kerja ke luar negeri asal Banyumas;
6) Perusahaan yang bersifat padat karya masih membatasi sistem kerja dan perekrutan;
7) Masih kurangnya perusahaan yang bersifat padat karya di Kabupaten Banyumas.

Dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penguatan lembaga-lembaga penempatan baik di dalam maupun diluar negeri;
2) Melaksanakan Pameran Kesempatan Kerja *(Job Fair);*
3) Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
4) Telah membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) untuk memaksimalkan penyerapan alumni pelatihan pada dunia industry.
5) Memperluas kesempatan kerja dengan cara memanfaatkan usaha-usaha yang mampu menyerap pekerja yang banyak/padat karya.
6) Mempermudah ijin usaha, terutama UMKM yang saat ini masih sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat.

7) Melatih para pencari kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri/wirasawasta sehingga tidak bergantung pada pengguna tenaga kerja.

8) Mencari peluang kerja /kesempatan kerja baik di Kabupaten Banyumas maupun di luar Kabupaten Banyumas.

c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur dari 3 analisis yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tahun 2021, Nilai IKA Kabupaten Banyumas sebesar 68,00 (Status SEDANG), Nilai IKU sebesar 85,43 (Klasifikasi BAIK), sedangkan Nilai IKTL sebesar 67,00. Hasil kalkulasi dari ketiga indeks tersebut menghasilkan Nilai IKLH 2021 Kabupaten Banyumas sebesar **72,83 (Predikat BAIK)**.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.14.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2021

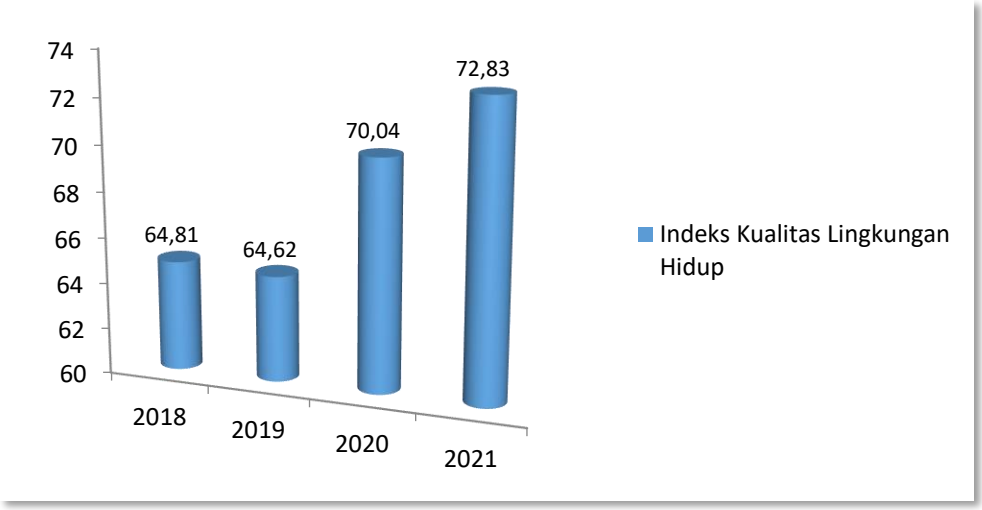

Sumber : RPJMD 2018-2023 Kabupaten Banyumas, 2021

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 diatas, dengan target di tahun 2021 sebesar 63,97% sehingga prosentase capaian sebesar 113,85%. Aapabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 sebesar 64,15 sudah melampaui angka yang ditetapkan yaitu meningkat sebesar 113,53%.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyumas meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan melalui langkah-langkah antara lain :

1) Pembangunan/pengembangan RTH (untuk menambah resapan air);
2) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
3) Penyusunan informasi kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian);
4) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
5) Pengembangan pertanian hortikultura dan tanaman pangan;
6) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan; dan
7) Perlindungan tanaman.

Selain langkah-langkah tersebut, pencapaian tujuan perwujudan Kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja didukung melaui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Program dan Anggaran Tujuan 6 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	37.385.141.985	35.778.904.492	95,70
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	5.798.000	5.792.900	99,91
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	395.629.125	255.090.925	64,48

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
4	Program Promosi Penanaman Modal.	108.079.650	103.499.180	95,76
5	Program Penempatan Tenaga Kerja.	42.651.800	42.508.200	99,66
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.	557.095.775	432.320.326	58,22
7	Program Hubungan Industrial.	52.256.900	51.504.725	98,56
8	Program Pengelolaan Persampahan.	17.881.455.650	16.361.109.115	91,50
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).	33.855.130.000	24.398.883.441	72,07
10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).	99.828.000	99.534.500	99,71
11	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	197.843.000	187.741.500	94,89
12	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	78.207.500	66.816.200	85,43
13	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	672.000.000	614.626.488	91,46
14	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah	1.628.550.000	621.515.500	38,16

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	B3).			
15	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	44.919.900	44.876.400	99,90
16	Program Penatagunaan Tanah.	186.804.640	161.459.575	86,43
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	890.930.100	858.537.100	96,36
18	Program Penanggulangan Bencana.	1.938.976.250	1.737.776.076	89,62

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.10.
Bupati Banyumas Membuka Job Fair 2021 Secara Virtual

Gambar 3.11.
Peresmian 6 (enam) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Baru

7. TUJUAN 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat telah ditetapkan indikator berupa Persentase Kinerja Infrastruktur.

Capaian indikator Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebesar 54,135% atau sebesar 101,55% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 53,31%.

Peningkatan Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.15.
Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021

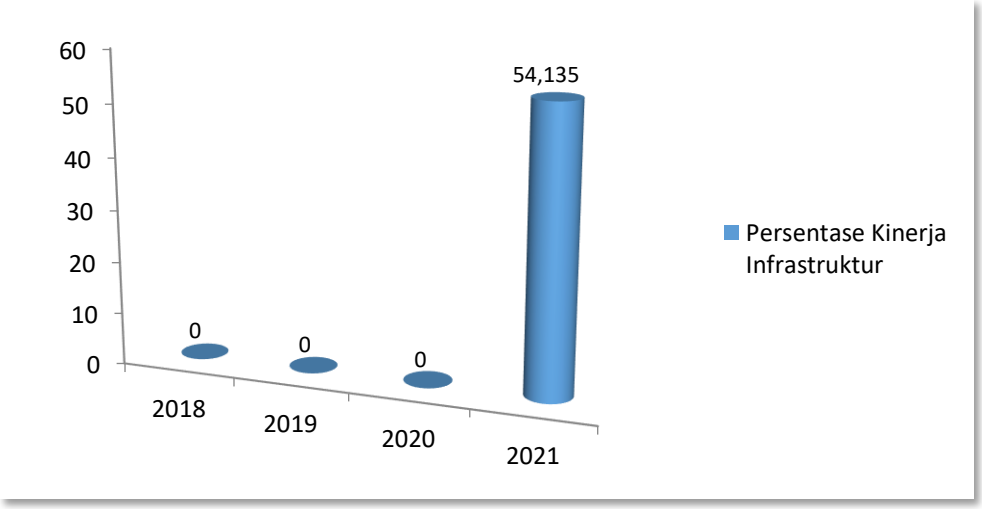

Sumber : RPJMD 2018-203 Kabupaten Banyumas, 2021

Indikator persentase kinerja infrastuktur merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD 2018-2023. Capaian realisasi Persentase Kinerja Infrastruktur diatas, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 sebesar 78,87 belum melampaui angka yang ditetapkan yaitu sebesar 68,64%.

Kinerja infrastruktur menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Komponen Kinerja Infrastruktur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Irigasi, dan Sistem Drainase

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, persentase bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik, persentase jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 30,28%, mengalami kenaikan menjadi 34,96% di tahun 2017, 35,47% pada tahun 2018, meningkat menjadi 37,87% di tahun 2019, 47,51% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 51,11% di tahun 2021. Berdasarkan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten menambah panjang jalan kabupaten yang semula sepanjang 804,784 Km menjadi 1.508 Km. Penambahan tersebut berasal dari ruas jalan desa yang menghubungkan antar desa yang kemudian diserahkan kewenangannya menjadi jalan kabupaten. Pada tahun 2021 panjang jalan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Kondisi jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Kondisi	Panjang	%	Kondisi		
Baik	770,729	51,11	1.202,875	79,77%	Mantap
Sedang	432,146	28,66			
Rusak ringan	151,295	10,03	305,125	20,23%	Tidak Mantap
Rusak berat	153,830	10,20			
Jumlah	1.508,00	100,00	1.508,00	100,00	

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2021 kondisi panjang jalan dalam keadaan baik menjadi 51,11%, sementara yang sedang sebesar 28,66%, sehingga kondisi panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi sebesar 79,77%. Secara rinci panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap
dari Tahun 2017-2021

Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan kabupaten	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	34,96	35,47	37,87	47,51	51,11
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	20,95	23,53	25,83	28,76	28,66
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (%)	27,63	22,09	19,39	9,79	10,03
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (%)	16,46	18,92	16,91	13,93	10,20

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.12.
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2021

Sistem jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk mencapai ketahanan pangan dengan fungsi melayani ketersediaan air pada daerah irigasi. Kondisi jaringan irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan dan mendukung pencapaian hasta krida Bupati terkait produksi padi. Sejalan dengan hasta krida tersebut adalah hasta krida untuk peningkatan anggaran irigasi, sebagai upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi kabupaten. Bangunan irigasi di Kabupaten Banyumas sejumlah 658.505, dengan kondisi baik 529.136 (80,35%), rusak ringan 83.076 (12,63%), rusak sedang 17.493 (2,65%), rusak berat 28.800 (4,37%).

Drainase sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Banyumas, dari data panjang drainase yang dikelola 150,38 km, pada tahun 2020 drainase berkondisi baik tercatat sebesar 102,73 km (68,31%), dan pada tahun 2021 mencapai 107, 95 (71,78%) semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Keberadaan drainase

sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi :

1) Perlu dikembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastuktur melalui KPBU dan CSR.
2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bersifat konkuren.
3) Pembangunan infrastruktur terutama dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik lebih diprioritaskan.

b) Rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan kebutuhan rumah, peningkatan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. Selain permasalahan ketersediaan perumahan di Kabupaten Banyumas juga permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. Dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2021 mencapai 75,51%. Cakupan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2021 mencapai 88,83%.

Tabel 3.17.
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	322.466	331.360	334.674	337.553	343.986
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	70,54	72,67	73,71	74,22	75,51
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	75,33	82,88	87,79	88,45	83,83

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas , 2021

Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas. Penduduk miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas sehingga penghasilan juga rendah, serta kepemilikan aset. Perkembangan rasio rumah layak huni dan lingkungan kumuh perkotaan Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio rumah layak huni (%)	88,70	76,30	78,47	78,76	79,17
2.	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di Kab/Kota yang ditangani (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	6,12

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.13.
Bupati Banyumas Meresmikan Program Pembangunan RTLH di Desa Papringan Kecamatan Banyumas

c) Sarana Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang perhubungan. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi merupakan upaya mendukung permukiman yang layak dan berkelanjutan, mendorong produktiitas daerah dan pertumbuhan ekonomi. Bangunan Terminal tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai SK Bupati Banyumas Nomor 480/324 Tahun 2016 yaitu terminal Ajibarang dan Terminal Wangon telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program *Buy The Service* (BTS).

Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Pengembangan angkutan sungai didasarkan pada kajian Penyusunan SID Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan. Berdasarkan kajian tersebut direncanakan prasarana berupa 1 pelabuhan dan 6 halte sungai untuk pengembangan angkutan di Sungai Serayu. Selain untuk memberikan alternatif moda transportasi, angkutan sungai menjadi dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas.

Program BTS dilatarbelakangi permasalahan kemacetan serta tidak tertatanya sistem transportasi publik yang baik sehingga menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan public goods, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Jalur BRT yang dikembangkan meliputi: 1) Pasar Pon – Ajibarang, 2) Terminal Notog Patikraja – Baturaden, dan 3) Terminal Bulupitu - Terminal

Kebondalem. Jalur Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem diintegrasikan dengan Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga.

Gambar 3.14.
Wakil Bupati Banyumas melakukan Ujicoba Angkutan Sungai Serayu

Gambar 3.15.
Peresmian Bus Trans Banyumas oleh Bupati Banyumas dan Dirjen Perhubungan Darat

Tercapainya tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat didukung melaui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Program dan Anggaran Tujuan 7 Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capai an
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.994.757.043	36.059.745.456	92,47
2	Program Penyelenggaraan Jalan	84.461.735.405	71.683.596.541	84,87

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.	11.545.676.340	6.458.184.418	55,94
4	Program Pengembangan Permukiman.	14.894.996.000	14.792.063.489	99,31
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi.	263.250.030	261.730.730	99,42
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda).	33.815.190.683	28.347.226.504	83,83
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	10.911.427.000	10.835.161.310	99,30
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.841.847.250	3.822.732.250	99,50
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.374.309.726	16.239.264.965	99,18
10	Program Penataan Bangunan Gedung.	115.181.016.230	45.338.615.270	39,36
11	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	47.959.594.000	12.183.103.751	25,40
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.163.627.031	11.508.305.842	94,61
13	Program Pengelolaan Pelayaran	75.000.000	73.458.000	97,94

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

8. TUJUAN 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi telah ditetapkan indikator berupa Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas 2021 sebesar 5,2% atau sebesar 130% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4%.

Peningkatan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas 2021 apabila

dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.16.
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021

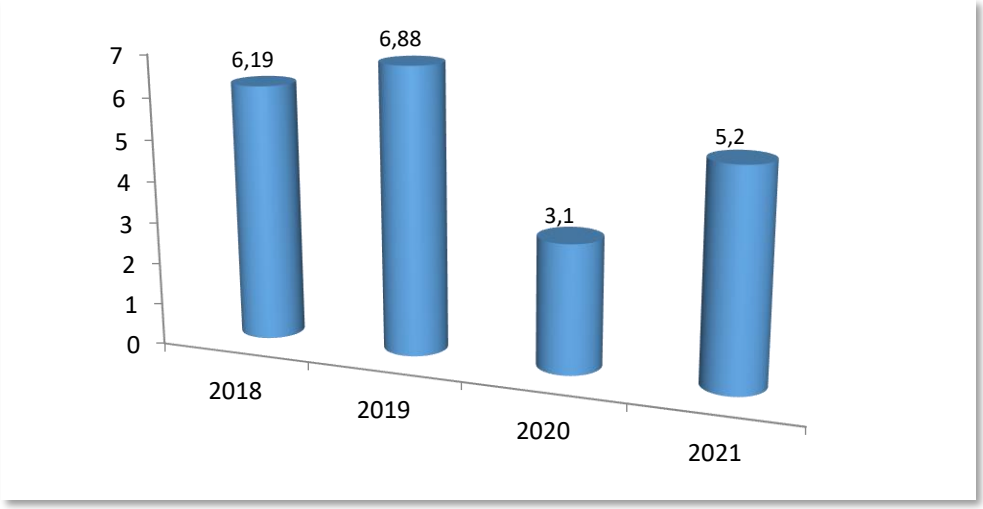

Sumber : RPJMD 2018-2023 Kabupaten Banyumas, 2021

Capaian realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 diatas, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 sebesar 7%, belum melampaui angka yang telah ditetapkan, karena baru mencapai 74,29%.

Dampak Pandemi Covid-19 di Banyumas di bidang ekonomi tidak hanya berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat saja, namun ini juga berdampak langsung ke pemerintah daerah, yakni sektor-sektor pendapatan daerah turun. Khusus untuk pemulihan keuangan daerah, salah satu daya upaya yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memperkuat kembali pendapatan daerah dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, dengan cara memanfaatkan pinjaman daerah dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada tahun 2021 dengan menggunakan dana PEN, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan langkah-langkah pengembangan pariwisata yang di fokuskan pada 3 (tiga) tempat yaitu pengembangan pariwisata di Kawasan kota baru (Jl. Ir. Sukarno), Taman Maskemambang dan Kawasan wisata Baturraden.

Langkah-langkah yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain :

a) Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif.
b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pemanfaatan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya.
c) Meningkatkan kualitas Usaha kerakyatan dengan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro.

Selain hal tersebut, langkah lain yang ditempuh dalam mendukung pencapaian indikator urusan pariwisata adalah melalui pengembangan desa wisata. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 15 (limabelas) dan pada tahun 2021 bertambah 2 desa sehingga menjadi 17 (tujuh belas) desa dari 301 desa yang ada.

Pengembangan desa wisata sangat potensial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wsatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pada tahun 2021 Desa Wisata Cikakak masuk 50 (lima puluh) besar ajang Anugerah Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan menjadi Desa Wisata terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.16.
Kunjungan Menparekraf Ke Desa Cikakak

Perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2021

Uraian	Sat	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan wisata	org	2.111.865	2.363.002	3.580.743	1.866.157	1.466.580
a. Wisatawan Nusantara	org	2.111.367	2.111.367	3.580.485	1.866.083	1.466.571
b. Wisatawan Mancanegara	org	498	498	258	74	9

Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2021

Berdasarkan data jumlah kunjungan wisata tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan kunjungan wisata pada tahun 2020 menjadi 1.498.236 kunjungan wisata ditahun 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak bagi sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas. Penurunan kunjungan wisata disebabkan antara lain :

1) Pembatasan Jumlah Pengunjung berdasakan kebijakan PPKM Jawa-Bali
2) Segmentasi wisatawan sebagian besar berasal dari wilayah lokal dan regional karena dampak psikologis dari covid 19.
3) kondisi ekonomi masyarakat sehingga adanya prioritas pemenuhan kebutuhan
4) Adanya penutupan seluruh obyek wisata di Kabupaten Banyumas karena covid-19 mulai triwulan II tahun 2020.
5) Tidak adanya event wisata maupun budaya tahun 2021 karena ada pembantasan sosial berskala besar dari pemerintah pusat.
6) Adanya Surat Edaran Bupati Banyumas tentang pembatasan jumlah kunjungan.

Dalam rangka meningkatkan pariwisata dan jumlah wisawatan serta obyek wisata di masa pandemi covid-19, hal-hal yang dilaksanakan antara lain:

1) Promosi wisata melalui media elektronik (media sosial, aplikasi Dolan Banyumas).
2) Menerapkan Sapta Pesona dan Sadar Wisata disemua objek wisata.
3) Menerapkan wisata BISA (Bersih, Sehat, Aman).
4) Menerapkan *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) (CHSE) di semua objek wisata.
5) Menerapkan transaksi non tunai (*cashless*) untuk mengurangi penularan Covid 19.
6) Melaksanakan penerapan aplikasi peduli lindungi.
7) Menerapkan gugus covid internal.
8) Menerapkan program angkutan wisata gratis yang beroperasi setiap hari libur, Sabtu dan Minggu.

Selain sektor wisata, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mengembangkan ekonomi kreatif, dalam mengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan prinsip pengembangan ekonomi kreatif dengan menggunakan prinsip-prinisip sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 meliputi :

1) Pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
2) Peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi.
3) Penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional.
4) Pengembangan dan pemanfaatan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan dunia.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif, langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

1) Peningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku industri kreatif, dengan melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi/pendampingan dalam rangka pengembangan industri kreatif.
2) Peningkatan penggunaan teknologi dalam mengembangkan industri kreatif.
3) Fasilitasi event-event pameran, baik tingkat provinsi dan nasional dalam rangka pemasaran produk dan menumbuhkan pangsa pasar bagi industri kreatif.

Tercapainya tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif didukung melaui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.21.
Program dan Anggaran Tujuan 8 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Pemasaran Pariwisata	289.422.891	256.541.466	88,64
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	230.000.000	203.866.433	88,64
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	18.490.464.000	6.956.363.468	37,62
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	230.000.000	203.866.433	88,64
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	5.231.800	5.231.800	100,00
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	16.281.500	16.280.330	99,99
7	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7.303.100	7.303.100	100,00
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	3.559.900	3.559.900	100,00
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	650.297.750	628.251.240	96,61
10	Program Pengembangan UMKM	140.856.910	128.364.910	91,13

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.17.
Bupati Banyumas Melakukan Uji Coba Bus Wisata

9. TUJUAN 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu angka kriminalitas.

Capaian indikator Angka Kriminalitas Kabupaten Banyumas 2021 sebesar 1,22 atau sebesar 126,33% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,656.

Capaian Angka Kriminalitas Kabupaten Banyumas tahun 2021 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2018-2021 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.17
Angka Kriminal Kabupaten Banyumas tahun 2018-2021
(per 10.000 Penduduk)

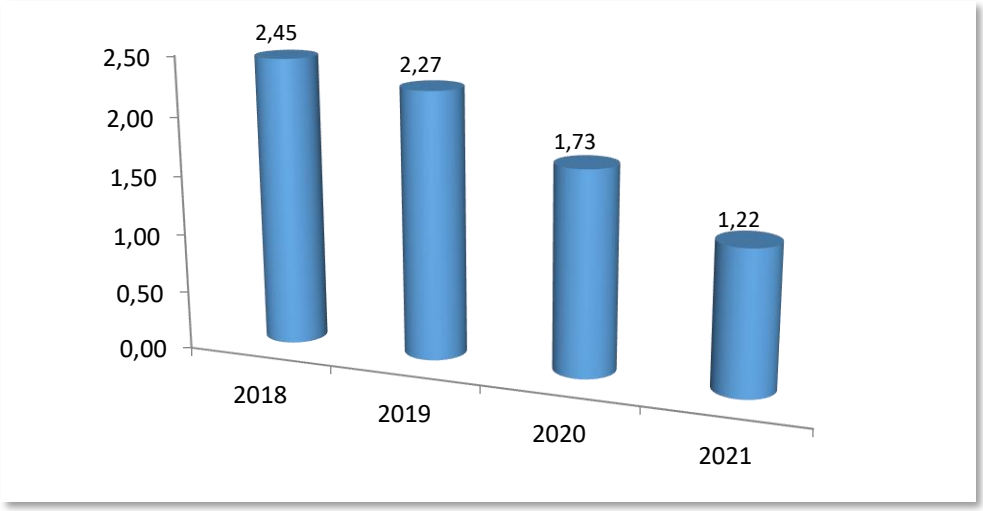

Sumber : RPJMD 2018-2023 Kabupaten Banyumas, 2021

Capaian realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2021 diatas, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018-2023 sebesar 1,516 sudah melampaui angka yang ditetapkan yaitu sebesar 119,53%.

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi, cenderung menurun dari tahun 2018 sebesar 2,454, di tahun 2019 sebesar 2,266, di tahun 2020 sebesar 1,730, dan di tahun 2021 sebesar 1,22.

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah :

a. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar antara lain dengan menggalakkan ronda malam (siskamling) dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling).
b. Meningkatkan peran serta pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
c. Memberlakukan aturan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan.
d. Menumbuhkan kerja sama yang solid antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sebagai upaya pencegahan preventif.

Selain langkah-langkah diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, telah pula melaksanakan langkah-langkah antara lain :

a) Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.
b) Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan dengan memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya serta meningkatkan peran forum komunikasi,dialog, dan diskusi antar umat beragam.

c) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penegakan Perda/Perbup dan mengoptimalkan pelayanan keamanan masyarakat.

d) Meningkatkan pelestarian budaya dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya.

Tercapainya tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat didukung melaui program-program sebagai berikut :

Tabel 3.22.
Program dan Anggaran Tujuan 9 Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.985.828.992	2.979.796.340	99,80
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.595.192.563	34.098.712.846	95,80
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.255.854.300	1.255.854.300	100.00
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	35.230.000	31.867.900	90,46
5	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.	1.470.488.750	1.470.486.050	100,00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	487.347.400	434.082.360	89,07

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.			
7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	10.325.000	9.405.000	91,09
8	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	174.095.000	168.779.800	96,95
9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.	40.000.000	31.625.000	79,06
10	Program Pengelolaan Permuseuman.	640.000.000	573.010.755	89,53
11	Program Pengembangan Kebudayaan.	921.295.000	857.896.100	93,12
12	Program Pengembangan Kesenian Tradisional.	480.000.000	445.270.000	92,76
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.	85.429.350	71.552.700	83,76
14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.	3.140.952.653	3.085.201.373	98,23
15	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	900.000.000	900.000.000	100,00

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Gambar 3.18.
Forum Umat Beragama

B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23.
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi
1.	**Pendapatan Daerah**	**3.425.189.190.159**	**3.439.836.319.823**	**100,41**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	710.179.509.944	761.614.207.026	107,24
1.2	Pendapatan Transfer	2.532.807.430.337	2.535.638.096.546	100,11
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	182.202.249.878	142.134.016.251	78,01
2.	**Belanja Daerah**	**3.863.994.130.518**	**3.338.746.354.430**	**86,41**
2.1	Belanja Operasi	2.547.958.032	2.225.546.445.871	87,35
2.2	Belanja Modal	602.534.670.438	409.646.669.720	67,99
2.3	Belanja Tidak Terduga	84.978.997.098	77.757.965.424	91,50
2.4	Belanja Transfer	628.521.904.950	625.795.273.415	99,57
3.	**Pembiayaan Daerah**	**438.804.940.359**	**313.058.077.979**	**71,34**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**489.150.940.359**	**362.806.077.979**	**74,17**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	294.230.476.359	294.230.476.359	100,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	191.920.464.000	68.575.601.620	35,73
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	0	0,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50.346.000.000**	**49.748.000.000**	**98,81**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	28.846.000.000	20.000.000.000	97,93
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.499.000.000	99,93
	Pembiayaan Netto	**438.804.940.359**	**313.058.077.979**	**71,34**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0**	**413.698.043.372**	**0**

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas, 2021

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2021

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.078.019.897.857	999.342.425.581	92,70
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.939.847.627.963	1.769.675.072.146	91,23
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	32.831.336.425	32.094.352.972	97,76
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	57.097.628.418	47.869.775.658	83,84
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	22.962.124.813	22.523.758.423	98,09
6.	Perwujudan pembangunan	96.021.298.275	81.714.496.643	85,10

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
	kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja			
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	390.482.426.738	257.603.188.526	65,97
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	19.833.417.851	8.205.762.647	41,37
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	48.222.039.008	46.413.540.524	96,25
JUMLAH		1.273.294.764.390	1.091.642.168.980	85,73

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2021

Anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25.
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				
1.	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	N/A	999.342.425.581	92,70

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok				
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	100,36	1.769.675.072.146	91,23
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	90,81	32.094.352.972	97,76
	MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan				
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	97,98	47.869.775.658	83,84
	MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan				
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	108,04	22.523.758.423	98,09
	MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan				
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	3	92,04	81.714.496.643	85,10
	MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	101,55	257.603.188.526	65,97
	MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan	1	130	8.205.762.647	41,37

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	ekonomi kreatif				
	MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	126,33	46.413.540.524	96,25

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2021

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 9 tujuan/sasaran strategis, 5 (lima) tujuan/sasaran strategis sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.26.
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
	MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	N/A	92,70	-
	MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok				
2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan	1	100,36	91,23	9,13

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
	dan derajat kesehatan masyarakat				
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	90,81	97,76	-
	MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan				
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	97,98	83,84	-
	MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan				
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	108,04	98,09	9,95
	MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan				
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	3	92,04	85,10	-
	MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	101,55	65,90	35,65
	MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1	130	41,37	88,63
	MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	126,33	96,25	30,08

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas bahwa untuk tujuan 1 (satu) yaitu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik untuk dengan indkator Indeks Reformasi Birokrasi hingga saat ini belum ada data dari Kementerian PAN dan RB, dan terdapat 5 (lima) tujuan/sasaran strategis memperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi

persentase anggaran, sedangkan 3 (tiga) tujuan/sasaran strategis masih kurang efisien, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan sumber daya tertinggi dicapai pada tujuan ke 8 (delapan) yaitu menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana realisasi anggaran sebesar 41,37% dapat mencapai prosentase capaian kinerja sebesar 130%. Efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 didukung oleh hal-hal sebagai berikut :
   a) Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas dengan model *One District One Destination (ODOD).*
   b) Dukungan transportasi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas.
   c) Dukungan pemerintah melalui kebijakan pada sektor pariwisata pada masa pandemi yang mendukung pemulihan ekonomi baik lokal maupun nasional. Kebiajkan tersebut didasarkan dua isu strategis yaitu, *trust* wisatawan dan *safety* wisatawan guna menjamin *sustainability* keberlanjutan sektor wisata.
   d) Partisipasi pihak swasta yang cukup tinggi dalam pengembangan pariwisata.
   e) Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata.
   f) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman berupa pembebasan pajak hotel dan pajak restoran.
2. Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 paling rendah pada tujuan ke-3 , dimana indikator tujuan ke-3 yaitu Persentase Penduduk Miskin, dengan realisasi 90,81%. Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* banyak aktifitas ekonomi mengalami penurunan yang sifgnifikan sehingga kemiskinan dan pengangguran semakin naik, banyak para pengusaha UMKM merumahkan sebagian karyawannya, sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keberhasilan pencapaian kinerja tertinggi salah satunya dukungan program dan kegiatan. Penjelasan kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dalam urusan pariwisata, didukung oleh program pemasaran pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Untuk mendukung program tersebut dijabarkan dalam kegiatan : pengelolaan daya tarik wisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, dan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Upaya yang ditempuh dengan mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengembangan desa wisata yang sampai dengan tahun 2021 mencapai 17 (tujuh belas) desa.

b) Program lain yang mendukung capaian kinerja yaitu Program Pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pemberdayaan UMKM, dan program pengembangan UMKM. Dengan adanya UMKM maka sangat berperan dalam perkembangan pariwisata, ciri khas suatu daerah yang sering dicari oleh wisatawan umumnya disediakan oleh UMKM tersebut. Selain itu Kontribusi UMKM sektor Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pariwisata.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2021, telah dilaksanakan sebanyak 145 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 409.270.486.239,34, realisasi nilai kontrak sebesar Rp

378.331.888.641,64, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 30.938.597.597,70 atau 7,56%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2021 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 141 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 93.466.942.508,00, realisasi pengadaan sebesar Rp 68.076.571.617,00, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 25.390.370.891,00 atau 27,16%

Sudah lebih dari dua tahun sejak Maret hingga Desember 2021, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Dalam rangka upaya mencegah, meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan agar sistem pemerintahan daerah tetap berjalan maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan sebagai berikut:

a) Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di setiap Perangkat Daerah.
b) Adanya penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mengatur tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home/WFH*), dengan jadwal diatur disesuaikan dengan kondisi covid di Kabupaten Banyumas.
c) Untuk satuan kerja bidang kesehatan dalam hal ini tenaga pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan tetap melaksanakan tugas di kantor agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar.
d) Untuk satuan kerja bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan bidang perhubungan tetap melaksanakan tugas di kantor (*Work From Office/WFO* 100%) agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
e) Melakukan pembatasan kegiatan kegiatan/rapat yang mengumpulkan orang.
f) Melakukan penundaan kegiatan dinas luar daerah dan/atau luar negeri.
g) Melakukan pembatasan pertemuan dengan tamu dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan kunjungan dari luar daerah

dan/atau luar negeri kecuali terkait dengan koordinasi pencegahan Covid-19 atau atas seijin Bupati.

h) Menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor antara lain memakai masker atau penutup mulut/hidung, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak minimal 2 meter dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk mencegah penularan Covid-19.

i) Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dinas secara *online*/daring.

Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penanganan Covid-19, pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

a) Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. Pertimbangan adanya Peraturan Daerah ini yaitu bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi, bahwa mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Banyumas dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan/atau wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan payung hukum untuk menjamin kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

b) Penjadwalan ulang program dan kegiatan tahun anggaran 2021.

c) Melaksanakan refocusing anggaran.

d) Melaksanakan program vaksinasi kepada seluruh penduduk Kabupaten Banyumas.

e) Melakukan inovasi dengan pembangunan aplikasi yang berbasis android untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat tanpa harus bertatap muka.

f) Menyediakan rumah karantina dan rumah sakit darurat bagi penderita Covid-19.

Gambar 3.19.
Peluncuran Layanan Si Doi Mas (Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna)

Gambar 3.20.
Hotel Rosenda sebagai Rumah Sakit Darurat dan Rumah Karantina Penderita Covid-19

Ditengah kesibukan penanganan Covid-19, Kabupaten Banyumas tetap berprestasi yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas sepanjang kurun waktu Tahun 2021, diantaranya :

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
1	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (10 kali berturut-turut)	BPK RI	Pemkab Banyumas

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
2	Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kemenpan RB	Dindukcapil
3	Penghargaan Kepatuhan Tinggi Bidang Pelayanan Publik	Ombudsman RI	Pemkab Banyumas
4	Anugerah Layanan Investasi 2021 Terbaik II Tingkat Nasional	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	DPMPTSP
5	Jasa Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2021 Kategori Pejabat Negara	Kementerian Koperasi dan UKM	Wakil Bupati
6	Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA)	Pemkab Banyumas
7	Juara 1 *Green Leadership* Nirwasita Tantra Kategori Kabupaten Besar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	DPRD Kabupten Banyumas
8	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021, dengan kategori informatif pemerintah kabupaten atau kota	Komisi Informasi Jawa Tengah	Pemkab Banyumas
9	Penghargaan Pangripta Abipraya terbaik ke 2	Provinsi Jawa Tengah	Pemkab Banyumas
10	Desa Wisata terbaik	Provinsi Jawa Tengah	Dinporabudpar
11	Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Provinsi Jawa Tengah	Pemkab Banyumas
12	Juara 1 Lomba Bertutur	Provinsi Jawa Tengah	Dinarpusda
13	Juara 2 Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat SMA/MA	Provinsi Jawa Tengah	Dinarpusda
14	Juara Harapan 1 Lomba Perpustakaan Umum	Provinsi Jawa Tengah	Dinarpusda
15	Juara 2 Penghargaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) kategori Sumber Daya Manusia (SDM)	Provinsi Jawa Tengah	Pemkab Banyumas
16	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 untuk SMPN 3 Sokaraja	Provinsi Jawa Tengah	DLH
17	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 untuk SMPN 2 Kebasen	Provinsi Jawa Tengah	DLH

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
18	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 untuk SMAN 1 Purwokerto	Provinsi Jawa Tengah	DLH
19	Penghargaan Terbaik II Pelaksanaan Penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya di Kabupaten/Kota Tahun 2021	Provinsi Jawa Tengah	Dinperkim

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) Misi, 9 (sembilan) Tujuan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai **102,65%** atau kategori "**Sangat Baik**". Walaupun ada 5 (lima) indikator yang tidak tercapai dikarenakan adanya *force majeur pandemic Corona Virus Disease-19* (COVID-19) yang merupakan bencana nasional sehingga memaksa Kabupaten Banyumas untuk beradaptasi dengan situasi pandemic. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
TUJUAN 1						
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	N/A	N/A	**N/A**
TUJUAN 2						
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,18	72,44	100,36	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 3						
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan						
3.	Persentase penduduk miskin	%	12,51	13,66	90,81	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 4						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian						
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,1	4	97,56	**Sangat Tinggi**
5.	PDRB per Kapita	Juta rupiah	32,332	31,81	98,39	**Sangat Tinggi**

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capai an (%)	Predikat Kinerja
TUJUAN 5						
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
6.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,02	79,97	108,04	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 6						
Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
7.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	1,35	67,5	**Sedang**
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,75	6,05	94,78	**Sangat Tinggi**
9.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	63,97	72,83	113,85	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
10.	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	53,31	54,135	101,55	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4	5,2	130	**Sangat Tinggi**
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						
12.	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,656	1,22	126,33	**Sangat Tinggi**
RATA-RATA CAPAIAN					**102,65**	**Sangat Tinggi**

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 102,65% dengan predikat Sangat Tinggi.
2. 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (90,91%) tercapai dengan dikategorikan "Sangat Tinggi".
3. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (9,09%) tercapai dengan kategori "Sedang".
4. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama belum tersedia data.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, dengan 2 tujuan yaitu :

a) Tujuan ke-2, Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan target 72,18 dan terealisasi 72,44 sedangkan target akhir RPJMD adalah 75; dan

b) Tujuan ke-3, Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk Miskin dengan target 12,51% dan terealisasi 13,66% dan target akhir RPJMD 11%.

Grafik 4.1.
Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan ke-2

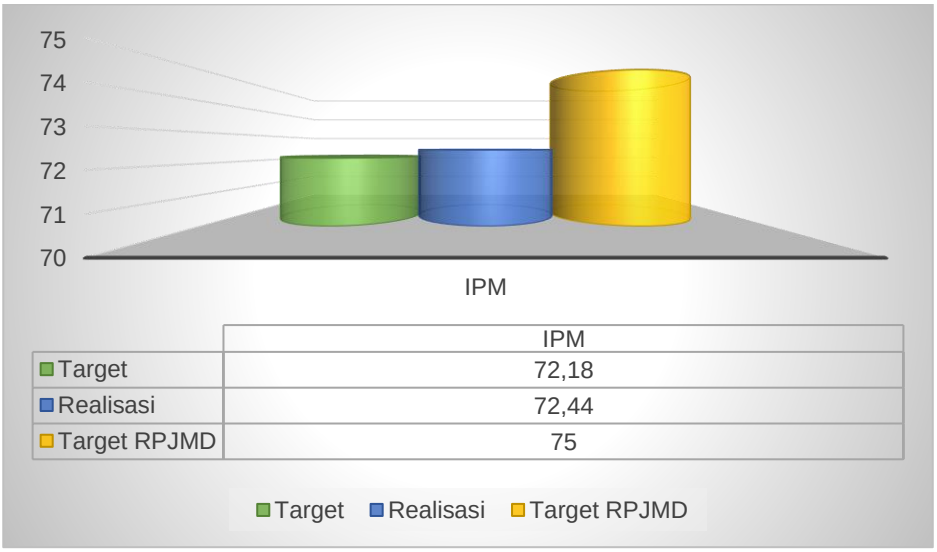

Grafik 4.2.
Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Tujuan ke-3

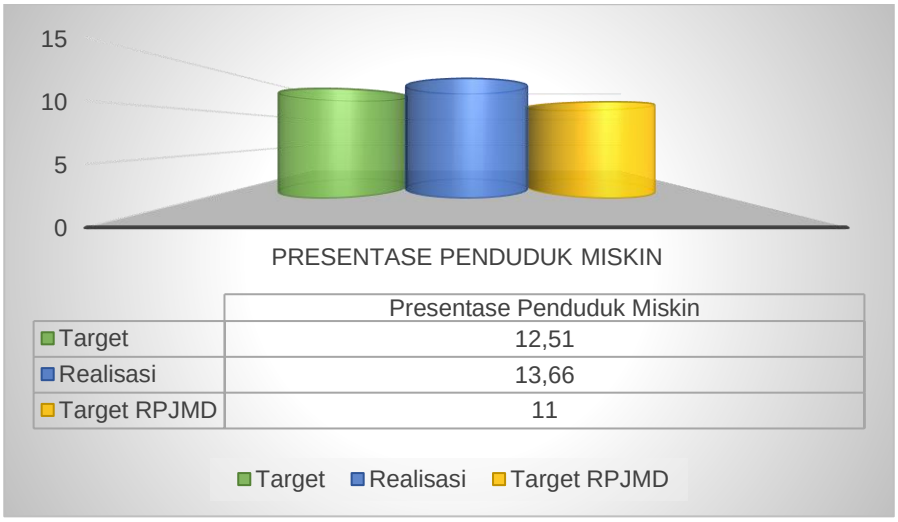

2. Ketersediaan Infrastruktur

Permasalahan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan, dengan tujuan ke-7 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan didukung oleh Indikator Kinerja Utama Persentase Kinerja Infrastuktur dengan target 53,31% dan terealisasi 54,135% dan target akhir RPJMD 78,87%. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.3.
Persentase Kinerja Infrastuktur

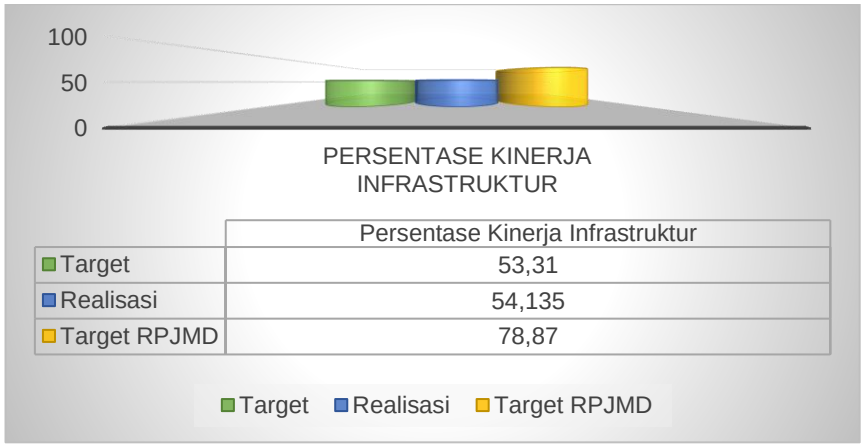

	Persentase Kinerja Infrastruktur
Target	53,31
Realisasi	54,135
Target RPJMD	78,87

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Permasalahan pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan pendapat masyarakat di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius, dengan tujuan ke-9: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu Angka kriminalitas dengan target 1,656 per 10.000 dan terealisasi 1,22 per 10.000 penduduk dengan target akhir RPJMD 1,516 per 10.000 penduduk. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.4.
Pengembangan Potensi Daerah
untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat

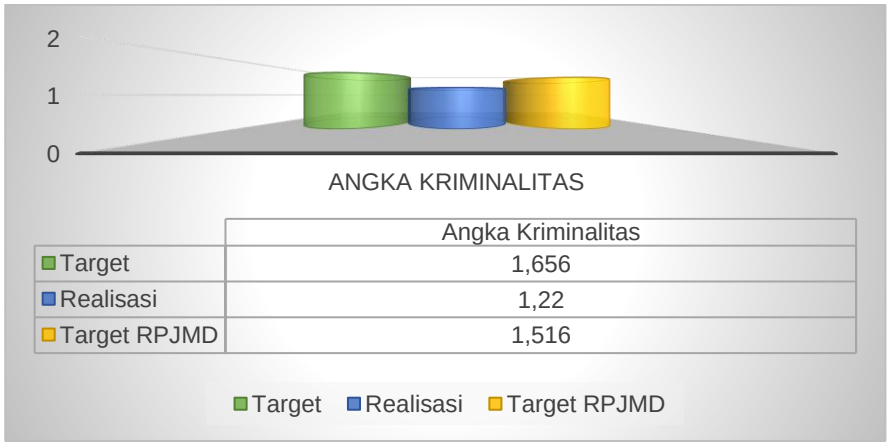

	Angka Kriminalitas
Target	1,656
Realisasi	1,22
Target RPJMD	1,516

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal, dengan tujuan ke-8 yaitu : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif dengan Indikator Kinerja Utama sebanyak 1 (satu) IKU, yaitu Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD dengan target 4% dan terealisasi 5,2% dan target akhir RPJMD 7%. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.5.
Kemiskinan dan Pengangguran

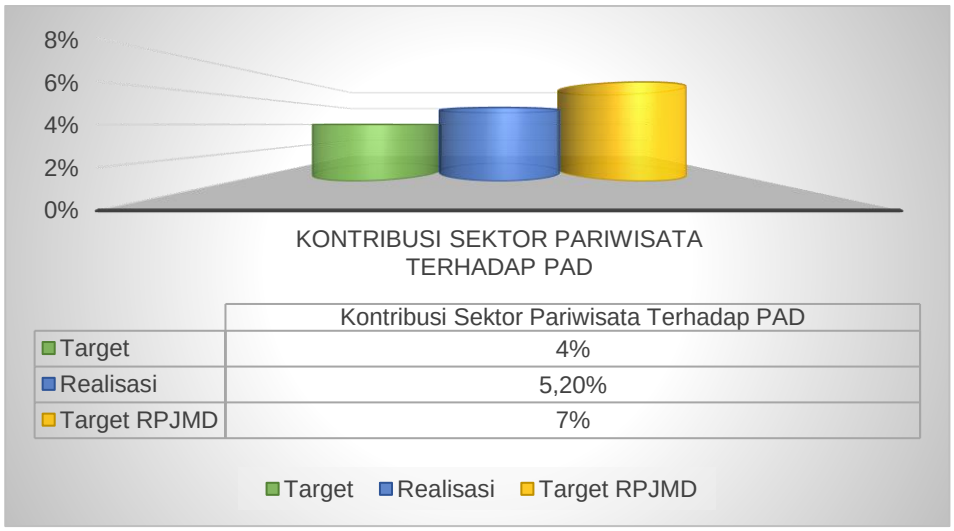

5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Permasalahan pertanian mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan 2 misi, yaitu Misi ke-3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dengan tujuan ke 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Pertumbuhan EKonomi dengan target 4,1% dan terealisai 4% dengan target akhir RPJMD 5%, sedangkan indikator lainnya yaitu PDRD per kapita dengan target Rp. 32,332 juta dengan realisasi Rp. 31,81 juta target akhir RPJMD Rp. 35,513 juta. Misi yang

lainnya yaitu misi ke-4: Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan dengan tujuan Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Pangan dengan target 74,02 realisasi 80.48 dengan target akhir RPJMD 74,04. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.6.
Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

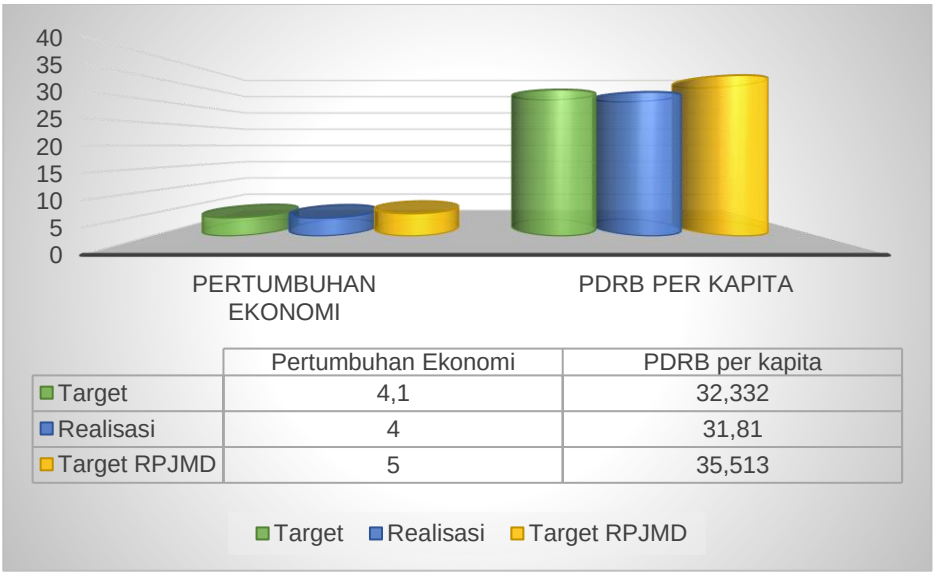

	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per kapita
Target	4,1	32,332
Realisasi	4	31,81
Target RPJMD	5	35,513

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-5 : Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan, dengan tujuan ke 6 : Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah dengan target 2% dan terealisasi 1,35, target akhir RPJMD 10%, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 5,75% da terealisasi 6,05% dengan target akhir RPJMD 4,5%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 63,97,terealisasi 72,83 dan target akhir RPJMD 64,15. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan progres penyelesaian isu tersebut diatas.

Grafik 4.7.
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

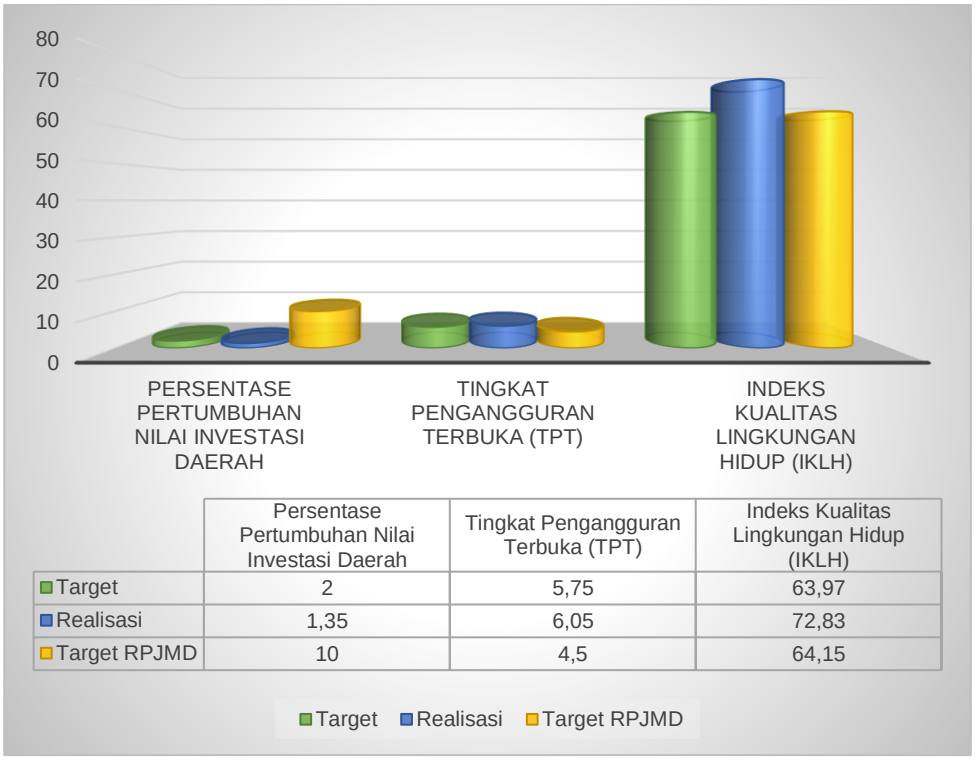

	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Target	2	5,75	63,97
Realisasi	1,35	6,05	72,83
Target RPJMD	10	4,5	64,15

7. Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023 diselesaikan dengan Misi ke-1 : Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan dengan tujuan : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 70, realisasi data belum tersedia karena belum rilis dari kementerian PAN dan RB dan target akhir RPJMD 75.